

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023



**DINAS PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN ACEH**

**JALAN PANGLIMA NYAK MAKAM NO. 24
BANDA ACEH**

BERITA ACARA REKONSILIASI REALISASI ANGGARAN TA.2023

Nomor: 030 / II / AKT/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kode (3.27.0.00.0.00.01), yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran (PA), dengan Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA), yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Aceh (BUA).

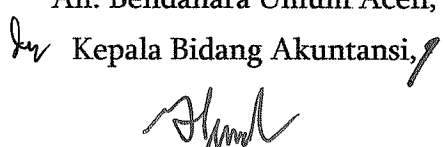
Pengguna Anggaran menyampaikan dokumen sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

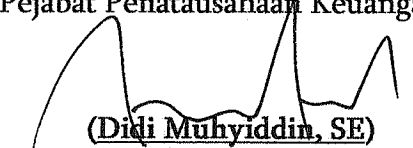
1. Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2023 Rp 0,-
2. Laporan Realisasi Belanja periode Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2023 dengan nilai Rp 196.014.238.994,64 (setelah dikurangi pengembalian belanja)
3. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja periode Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2023 dengan nilai Rp 451.956.949,- (Pengembalian Belanja LS dengan nilai Rp 17.568.083,- dan Pengembalian UP Rp 434.388.866,-)
4. Laporan Realisasi Pendapatan periode Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2023 dengan nilai Rp 400.423.788,99
5. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan periode Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2023 dengan nilai Rp 0,-
6. Sisa UP/GU/TU yang belum disetor s.d 31 Desember 2023 (Kas pada Bendahara Pengeluaran SKPA) adalah Rp 0,-
7. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 dengan nilai Rp 0,-
8. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 dengan nilai Rp 0,-
9. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 dengan nilai Rp 0,-

Selanjutnya Bendahara Umum Aceh menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SP2D dan STS yang disampaikan atas nama Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Aceh. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi ini.

Kesalahan/ketidakcocokan data yang tertuang dalam laporan Hasil Rekonsiliasi ini, akan dijadikan dasar perbaikan terhadap data dan laporan Pengguna Anggaran dan Bendahara Umum Aceh.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

An. Bendahara Umum Aceh,

(Hasnanda Maulina, SE, M. Si.Ak)
NIP.19770301 200604 2 003

An. Pengguna Anggaran,
Pejabat Penatausahaan Keuangan,

(Didi Muhyiddin, SE)
NIP. 19720222 200801 1 001

KATA PENGANTAR

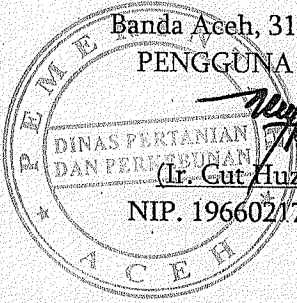
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023, maka dengan ini Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2023 berupa Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun dan disampaikan sebagai media pertanggungjawaban anggaran serta telah dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dan sebagai bahan evaluasi. Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Dalam Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun Anggaran 2023, dapat diketahui kinerja keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebagai satu kesatuan dari perangkat Pemerintah Aceh baik pengelolaan pendapatan maupun serapan belanja untuk mendanai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu juga dapat diketahui posisi dan kondisi keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yaitu operasional, aset, kewajiban dan ekuitas selama satu tahun anggaran berkenaan.

Demikian laporan keuangan ini disusun sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terus berupaya untuk menyajikan laporan keuangan yang benar-benar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga terwujud sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga Allah S.W.T senantiasa memberkati kita dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Banda Aceh, 31 Desember 2023
PENGUNA ANGGARAN 7

(Ir. Gut Huzaimah, MP) 12
NIP. 19660217 199203 2 003

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	vii
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
B. LAPORAN OPERASIONAL	2
C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	3
D. NERACA	4
E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	6
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	8
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	9
2.1. Ekonomi Makro	9
2.1.1 Pertanian	9
2.2. Kebijakan Keuangan	10
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja	10
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	12
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja	12
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	12
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	13
4.1. Entitas Akuntansi	13
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	13
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	13
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	16
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPA	46
5.1. Laporan Realisasi Anggaran.....	46
5.1.1 Pendapatan	46

5.1.2 Belanja.....	46
5.1.3 Surplus/Defisit	51
5.2. Laporan Operasional	51
5.2.1 Pendapatan-LO.....	51
5.2.2 Beban Operasi.....	52
5.2.3 Surplus/Defisit-LO.....	55
5.3. Laporan Perubahan Ekuitas	55
5.3.1 Ekuitas Awal.....	55
5.3.2 Surplus/Defisit-LO.....	55
5.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	55
5.4. Neraca	56
5.4.1 Aset Lancar	56
5.4.2 Aset Tidak Lancar.....	57
5.4.3 Kewajiban	78
5.4.4 Ekuitas.....	78
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	79
BAB VII PENUTUP	81



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Jln T. P. Nyak Makam No. 24 Telp. (0651) 7552041; Fax (0651) 7555324
Banda Aceh 23125

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Operasional (LO); (c) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banda Aceh, 31 Desember 2023

PENGGUNA ANGGARAN

(Ir. Cut Huzaimah, MP)

NIP. 19660217 199203 2 003



PEMERINTAH ACEH
SKPD : 3.27.0.00.0.00.01. - DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	900,098,120.00	400,423,788.99	44,49	609,599,170.50
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	900,098,120.00	400,423,788.99	44,49	609,599,170.50
4.1.02.	Retribusi Daerah	500,098,120.00	334,248,420.00	66,84	453,098,120.00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	500,098,120.00	334,248,420.00	66,84	453,098,120.00
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	290,878,120.00	162,998,420.00	56,04	243,878,120.00
4.1.02.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	40,050,000.00	36,420,000.00	90,94	40,050,000.00
4.1.02.02.11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	169,170,000.00	134,830,000.00	79,70	169,170,000.00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	400,000,000.00	66,175,368.99	16,54	156,501,050.50
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	19,937,939.00	-	56,900,282.00
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	19,937,939.00	-	56,900,282.00
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	400,000,000.00	46,237,429.99	11,56	99,600,768.50
4.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD	400,000,000.00	46,237,429.99	11,56	99,600,768.50
5.	BELANJA DAERAH	212,313,160,979.00	196,014,238,994.64	92,32	304,247,232,168.49
5.1.	BELANJA OPERASI	186,917,756,345.00	181,149,187,753.14	96,91	292,308,057,091.36
5.1.01.	Belanja Pegawai	70,254,163,343.00	69,499,211,599.00	98,93	72,259,648,883.00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	39,962,214,309.00	39,877,369,481.00	99,79	41,118,183,726.00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	30,350,891,969.00	30,345,592,200.00	99,98	31,322,708,948.00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	2,848,216,797.00	2,823,956,524.00	99,15	2,897,881,737.00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	417,620,000.00	412,860,000.00	98,86	447,785,000.00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1,233,993,900.00	1,217,862,500.00	98,69	1,217,304,000.00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1,010,024,500.00	1,003,135,000.00	99,32	1,072,920,000.00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	1,702,961,460.00	1,693,976,220.00	99,47	1,754,302,080.00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	95,404,729.00	90,145,601.00	94,49	99,504,231.00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1,625,036.00	386,466.00	23,78	402,737.00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2,043,163,616.00	2,040,489,567.00	99,87	2,047,846,563.00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	67,936,960.00	62,241,287.00	91,62	64,382,028.00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	190,375,342.00	186,724,116.00	98,08	193,146,402.00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	28,210,611,034.00	28,141,244,618.00	99,75	30,265,565,157.00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	-	-	-	5,079,478,775.00
5.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	-	-	-	392,000,000.00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7,383,543,000.00	7,353,343,000.00	99,59	1,089,420,000.00
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	20,827,068,034.00	20,787,901,618.00	99,81	23,704,666,382.00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1,481,338,000.00	1,480,597,500.00	99,95	875,900,000.00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	1,308,538,000.00	1,307,797,500.00	99,94	710,300,000.00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	172,800,000.00	172,800,000.00	100,00	165,600,000.00
5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	600,000,000.00	-	-	-
5.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	600,000,000.00	-	-	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	116,663,593,002.00	111,649,976,154.14	95,70	220,048,408,208.36
5.1.02.01.	Belanja Barang	79,222,641,930.00	78,101,988,691.00	98,59	172,691,150,823.00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	79,222,641,930.00	78,101,988,691.00	98,59	172,688,900,823.00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	2,250,000.00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	19,719,582,796.00	19,258,934,735.00	97,66	28,686,898,412.00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	17,204,653,696.00	17,021,476,110.00	98,94	24,114,496,602.00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	57,780,000.00	54,770,625.00	94,79	200,613,375.00
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	22,200,000.00	22,200,000.00	100,00	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	302,771,200.00	293,133,000.00	96,82	107,450,150.00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2,091,338,000.00	1,826,948,000.00	87,36	3,654,424,000.00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10,089,900.00	9,657,000.00	95,71	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	-	342,594,285.00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	-	150,000,000.00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30,750,000.00	30,750,000.00	100,00	117,320,000.00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	4,126,078,509.00	4,100,162,570.00	99,37	5,581,520,515.36
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,364,834,857.00	3,339,046,668.00	99,23	4,656,505,176.00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	679,674,652.00	679,546,902.00	99,98	900,167,989.36
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81,569,000.00	81,569,000.00	100,00	24,847,350.00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	11,163,631,517.00	10,053,264,095.00	90,05	12,963,957,458.00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11,163,631,517.00	10,053,264,095.00	90,05	12,963,957,458.00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	131,658,250.00	130,358,250.00	99,01	124,881,000.00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	131,658,250.00	130,358,250.00	99,01	124,881,000.00
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2,300,000,000.00	5,267,813.14	0,23	-
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2,300,000,000.00	5,267,813.14	0,23	-
5.2.	BELANJA MODAL	25,395,404,634.00	14,865,051,241.50	58,53	11,939,175,077.13
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,808,018,748.00	5,388,531,410.00	54,94	2,603,652,590.00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	181,000,000.00	179,248,350.00	99,03	-
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	181,000,000.00	179,248,350.00	99,03	-
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	115,000,000.00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	115,000,000.00
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	72,312,024.00	64,709,120.00	89,49	24,309,000.00
5.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	-	-	-	11,322,000.00
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	72,312,024.00	64,709,120.00	89,49	12,987,000.00
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	6,286,650,898.00	2,102,030,000.00	33,44	80,444,000.00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	6,286,650,898.00	2,102,030,000.00	33,44	80,444,000.00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	806,034,500.00	780,513,540.00	96,83	1,145,224,490.00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	57,000,000.00	56,541,560.00	99,20	187,190,000.00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	731,184,500.00	706,121,980.00	96,57	919,684,490.00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	17,850,000.00	17,850,000.00	100,00	38,350,000.00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	269,019,850.00	258,685,400.00	96,16	339,704,500.00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	269,019,850.00	258,685,400.00	96,16	333,804,500.00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	-	-	-	5,900,000.00
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	1,161,751,476.00	1,012,280,000.00	87,13	-
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1,161,751,476.00	1,012,280,000.00	87,13	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	1,031,250,000.00	991,065,000.00	96,10	872,930,000.00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	984,400,000.00	944,215,000.00	95,92	741,053,000.00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	46,850,000.00	46,850,000.00	100,00	131,877,000.00
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	26,040,600.00
5.2.02.15.03.	Belanja Modal Alat SAR	-	-	-	26,040,600.00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9,393,042,458.00	9,176,586,081.50	97,70	7,937,168,037.13
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	9,393,042,458.00	9,176,586,081.50	97,70	7,937,168,037.13
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	8,878,542,458.00	8,664,210,915.50	97,59	7,937,168,037.13
5.2.03.01.02.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	514,500,000.00	512,375,166.00	99,59	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	224,979,750.00	224,933,750.00	99,98	448,354,450.00
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	214,133,750.00	214,133,750.00	100,00	448,354,450.00
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	214,133,750.00	214,133,750.00	100,00	-
5.2.04.01.02.	Belanja Modal Jembatan	-	-	-	448,354,450.00
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	10,846,000.00	10,800,000.00	99,58	-
5.2.04.02.06.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	10,846,000.00	10,800,000.00	99,58	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,969,363,678.00	75,000,000.00	1,26	950,000,000.00
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	75,000,000.00	75,000,000.00	100,00	950,000,000.00
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	75,000,000.00	75,000,000.00	100,00	950,000,000.00
5.2.05.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	5,894,363,678.00	-	-	-
5.2.05.99.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	5,894,363,678.00	-	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(211,413,062,859.00)	(195,613,315,205.65)	92,53	(303,637,632,997.99)

Banda Aceh, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Aceh
DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN
Ir. Cut Huzaimah, MP
NIP. 19660217 199203 2 003

PEMERINTAH ACEH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL	0.00	0.00	Rp0	0,00
PENDAPATAN DAERAH-LO	400,401,182.51	611,358,074.61	-Rp210.956.892	-34,51
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	400,401,182.51	611,358,074.61	-Rp210.956.892	-34,51
Retribusi Daerah-LO	334,225,813.52	454,857,024.11	-Rp120.631.211	-26,52
Retribusi Jasa Usaha-LO	334,225,813.52	454,857,024.11	-Rp120.631.211	-26,52
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	162,975,813.52	245,637,024.11	-Rp82.661.211	-33,65
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	36,420,000.00	40,050,000.00	-Rp3.630.000	-9,06
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	134,830,000.00	169,170,000.00	-Rp34.340.000	-20,30
Lain-lain PAD yang Sah-LO	66,175,368.99	156,501,050.50	-Rp90.325.682	-57,72
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	19,937,939.00	56,900,282.00	-Rp36.962.343	-64,96
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	19,937,939.00	56,900,282.00	-Rp36.962.343	-64,96
Pendapatan dari BLUD-LO	46,237,429.99	99,600,768.50	-Rp53.363.339	-53,58
Pendapatan dari BLUD-LO	46,237,429.99	99,600,768.50	-Rp53.363.339	-53,58
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	400,401,182.51	611,358,074.61	-Rp210.956.892	-34,51
BEBAN DAERAH	191,644,820,050.51	307,775,600,176.81	-Rp116.130.780.126	-37,73
BEBAN OPERASI	191,631,235,530.51	306,700,369,280.81	-Rp115.069.133.750	-37,52
Beban Pegawai	69,499,211,599.00	72,259,648,883.00	-Rp2.760.437.284	-3,82
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	39,877,369,481.00	41,118,183,726.00	-Rp1.240.814.245	-3,02
Beban Gaji Pokok ASN	30,345,592,200.00	31,322,708,948.00	-Rp977.116.748	-3,12
Beban Tunjangan Keluarga ASN	2,823,956,524.00	2,897,881,737.00	-Rp73.925.213	-2,55
Beban Tunjangan Jabatan ASN	412,860,000.00	447,785,000.00	-Rp34.925.000	-7,80
Beban Tunjangan Fungsional ASN	1,217,862,500.00	1,217,304,000.00	Rp558.500	0,05
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	1,003,135,000.00	1,072,920,000.00	-Rp69.785.000	-6,50
Beban Tunjangan Beras ASN	1,693,976,220.00	1,754,302,080.00	-Rp60.325.860	-3,44
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	90,145,601.00	99,504,231.00	-Rp9.358.630	-9,41
Beban Pembulatan Gaji ASN	386,466.00	402,737.00	-Rp16.271	-4,04
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2,040,489,567.00	2,047,846,563.00	-Rp7.356.996	-0,36
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	62,241,287.00	64,382,028.00	-Rp2.140.741	-3,33
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	186,724,116.00	193,146,402.00	-Rp6.422.286	-3,33
Beban Tambahan Penghasilan ASN	28,141,244,618.00	30,265,565,157.00	-Rp2.124.320.539	-7,02
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	0.00	5,079,478,775.00	-Rp5.079.478.775	-100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0.00	392,000,000.00	-Rp392.000.000	-100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7,353,343,000.00	1,089,420,000.00	Rp6.263.923.000	574,98

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	20,787,901,618.00	23,704,666,382.00	-Rp2.916.764.764	-12,30
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1,480,597,500.00	875,900,000.00	Rp604.697.500	69,04
Beban Honorarium	1,307,797,500.00	710,300,000.00	Rp597.497.500	84,12
Beban Jasa Pengelolaan BMD	172,800,000.00	165,600,000.00	Rp7.200.000	4,35
Beban Barang dan Jasa	111,643,193,804.14	219,399,071,511.00	-Rp107.755.877.707	-49,11
Beban Barang	78,134,671,968.00	172,682,561,221.00	-Rp94.547.889.253	-54,75
Beban Barang Pakai Habis	78,134,671,968.00	172,680,311,221.00	-Rp94.545.639.253	-54,75
Beban Barang Tak Habis Pakai	0.00	2,250,000.00	-Rp2.250.000	-100,00
Beban Jasa	19,224,736,921.14	28,376,009,306.00	-Rp9.151.272.385	-32,25
Beban Jasa Kantor	16,987,278,296.14	24,146,201,781.00	-Rp7.158.923.485	-29,65
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	54,770,625.00	200,613,375.00	-Rp145.842.750	-72,70
Beban Sewa Tanah	22,200,000.00	0.00	Rp22.200.000	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	293,133,000.00	107,450,150.00	Rp185.682.850	172,81
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1,826,948,000.00	3,654,424,000.00	-Rp1.827.476.000	-50,01
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	9,657,000.00	0.00	Rp9.657.000	0,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0.00	150,000,000.00	-Rp150.000.000	-100,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30,750,000.00	117,320,000.00	-Rp86.570.000	-73,79
Beban Pemeliharaan	4,100,162,570.00	5,251,662,526.00	-Rp1.151.499.956	-21,93
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,339,046,668.00	4,656,505,176.00	-Rp1.317.458.508	-28,29
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	679,546,902.00	570,310,000.00	Rp109.236.902	19,15
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81,569,000.00	24,847,350.00	Rp56.721.650	228,28
Beban Perjalanan Dinas	10,053,264,095.00	12,963,957,458.00	-Rp2.910.693.363	-22,45
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,053,264,095.00	12,963,957,458.00	-Rp2.910.693.363	-22,45
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	130,358,250.00	124,881,000.00	Rp5.477.250	4,39
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	130,358,250.00	124,881,000.00	Rp5.477.250	4,39
Beban Penyusutan dan Amortisasi	10,488,830,127.37	15,041,648,886.81	-Rp4.552.818.759	-30,27
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5,065,804,282.83	9,654,643,742.82	-Rp4.588.839.460	-47,53
Beban Penyusutan Alat Besar	126,394,264.29	126,830,214.29	-Rp435.950	-0,34
Beban Penyusutan Alat Angkutan	1,491,910,556.00	1,885,740,256.00	-Rp393.829.700	-20,88
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	321,401,016.10	292,957,216.10	Rp28.443.800	9,71
Beban Penyusutan Alat Pertanian	203,129,432.75	4,204,940,682.75	-Rp4.001.811.250	-95,17
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,097,151,856.00	1,617,370,476.00	-Rp520.218.620	-32,15
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	192,823,781.20	165,679,781.20	Rp27.144.000	16,38
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	12,005,400.00	12,005,400.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	504,187,058.75	354,651,923.75	Rp149.535.135	42,16
Beban Penyusutan Komputer	1,116,800,917.74	994,467,792.73	Rp122.333.125	12,30
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,558,200,386.30	3,301,615,263.92	Rp256.585.122	7,77

(Dalam rupiah)

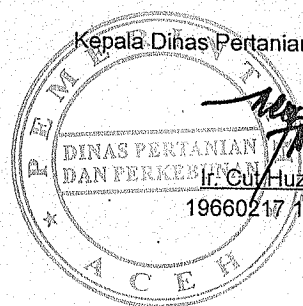
URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	3,275,174,881.68	3,022,559,736.88	Rp252.615.145	8,36
Beban Penyusutan Monumen	29,861,840.00	29,861,840.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	253,163,664.62	249,193,687.04	Rp3.969.978	1,59
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	876,950,810.54	1,160,159,712.38	-Rp283.208.902	-24,41
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	505,359,777.00	798,457,603.00	-Rp293.097.826	-36,71
Beban Penyusutan Bangunan Air	242,663,414.73	235,684,438.06	Rp6.978.977	2,96
Beban Penyusutan Instalasi	44,484,764.49	44,069,264.50	Rp415.500	0,94
Beban Penyusutan Jaringan	84,442,854.32	81,948,406.82	Rp2.494.448	3,04
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	10,891,586.89	10,233,106.88	Rp658.480	6,43
Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	10,891,586.89	10,233,106.88	Rp658.480	6,43
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	976,983,060.81	914,997,060.81	Rp61.986.000	6,77
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	976,983,060.81	914,997,060.81	Rp61.986.000	6,77
JUMLAH BEBAN OPERASI	191,631,235,530.51	306,700,369,280.81	-Rp115.069.133.750	-37,52
POS LUAR BIASA	0.00	0.00	Rp0	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0.00	1,000,791,500.00	-Rp1.000.791.500	-100,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0.00	1,000,791,500.00	-Rp1.000.791.500	-100,00
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	0.00	677,853,500.00	-Rp677.853.500	-100,00
Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	0.00	677,853,500.00	-Rp677.853.500	-100,00
Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0.00	322,938,000.00	-Rp322.938.000	-100,00
Defisit Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO	0.00	322,938,000.00	-Rp322.938.000	-100,00
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0.00	1,000,791,500.00	-Rp1.000.791.500	-100,00
BEBAN LAIN-LAIN	13,584,520.00	74,439,396.00	-Rp60.854.876	-81,75
Beban Lain-lain	13,584,520.00	74,439,396.00	-Rp60.854.876	-81,75
Beban Lain-lain	13,584,520.00	74,439,396.00	-Rp60.854.876	-81,75
Beban Lain-lain	13,584,520.00	74,439,396.00	-Rp60.854.876	-81,75
JUMLAH BEBAN LAIN-LAIN	13,584,520.00	74,439,396.00	-Rp60.854.876	-81,75
JUMLAH BEBAN	191,644,820,050.51	307,775,600,176.81	-Rp116.130.780.126	-37,73
SURPLUS/DEFISIT LO	(191,244,418,868.00)	(307,164,242,102.20)	Rp115.919.823.234	-37,74

Banda Aceh, 31 Desember 2023
PENGUNA ANGGARAN *[Signature]*
DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN
Ir. Cut Huzaimah, MP
NIP. 19660217-199203 2 003

PEMERINTAH ACEH
3.27.0.00.0.00.01. - DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31/Des/2023 DAN 2022

URAIAN	2023	2022
Ekuitas	494.366.703.641,29	490.898.467.354.45
RK PPKD	195.654.784.822,50	303.737.233.767.49
Surplus/Defisit-LO	(191.244.418.868,00)	(307.164.242.102.20)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0.00
Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	0,00	11.582.587.503.00
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	(88.844.515,89)	(4.631.142.881.45)
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun Lalu	0,00	(56.200.000.00)
JUMLAH EKUITAS AKHIR	498.688.225.079,90	494.366.703.641,29

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh



Ir. Cut Huzaimah, MP
19660217 199203 2 003

PEMERINTAH ACEH
3.27.0.00.0.00.01. - DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
NERACA
PER 31Desember2023 DAN 2022

Halaman 1 dari 4

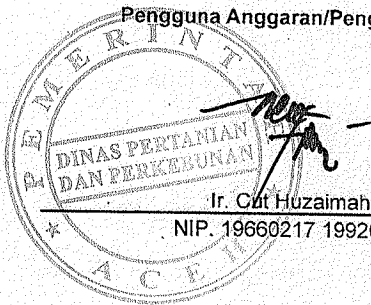
Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
ASET	503.376.394.990,51	494.570.320.859,69
ASET LANCAR	9.572.773.998,98	9.564.487.659,13
Kas dan Setara Kas	8.435.333.294,98	8.394.363.678,13
Kas di BLUD	8.435.333.294,98	8.394.363.678,13
Kas di BLUD	8.435.333.294,98	8.394.363.678,13
Persediaan	1.137.440.704,00	1.170.123.981,00
Barang Pakai Habis	1.137.440.704,00	1.170.123.981,00
Bahan	219.547.500,00	112.126.600,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	243.563.600,00	201.242.766,00
Obat-obatan	378.729.604,00	561.154.615,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	295.600.000,00	295.600.000,00
ASET TETAP	448.653.466.403,13	438.953.695.551,35
Tanah	280.997.151.190,50	280.997.151.190,50
Tanah	280.997.151.190,50	280.997.151.190,50
Tanah Persil	253.079.208.029,50	253.079.208.029,50
Tanah Non Persil	24.285.435.401,00	24.285.435.401,00
Lapangan	3.632.507.760,00	3.632.507.760,00
Peralatan dan Mesin	230.733.921.648,90	225.508.529.758,90
Alat Besar	4.733.672.375,00	4.554.424.025,00
Alat Bantu	4.733.672.375,00	4.554.424.025,00
Alat Angkutan	29.054.445.472,00	29.054.445.472,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	29.054.445.472,00	29.054.445.472,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.480.286.763,00	4.249.316.763,00
Alat Bengkel Bermesin	1.234.310.161,00	1.226.540.161,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	2.504.921.977,00	2.504.921.977,00
Alat Ukur	741.054.625,00	517.854.625,00
Alat Pertanian	141.189.958.105,00	141.189.958.105,00
Alat Pengolahan	141.189.958.105,00	141.189.958.105,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	26.905.402.565,00	25.915.344.025,00
Alat Kantor	6.941.842.312,00	6.684.080.752,00
Alat Rumah Tangga	18.339.755.953,00	17.625.308.973,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.623.804.300,00	1.605.954.300,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.908.230.906,00	1.772.510.906,00
Alat Studio	1.791.085.906,00	1.656.366.906,00
Alat Komunikasi	115.245.000,00	115.245.000,00
Peralatan Pemancar	1.900.000,00	1.900.000,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	136.328.505,00	136.328.505,00
Alat Kedokteran	101.447.000,00	101.447.000,00
Alat Kesehatan Umum	34.881.505,00	34.881.505,00
Alat Laboratorium	8.373.772.994,00	5.785.562.994,00
Unit Alat Laboratorium	8.250.229.994,00	5.662.019.994,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	36.550.000,00	36.550.000,00
Alat Peraga Praktik Sekolah	52.653.000,00	52.653.000,00
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	34.340.000,00	34.340.000,00
Alat Persenjataan	107.900.000,00	107.900.000,00
Persenjataan Non Senjata Api	57.900.000,00	57.900.000,00
Alat Khusus Kepolisian	50.000.000,00	50.000.000,00
Komputer	13.508.625.913,90	12.407.440.913,90
Komputer Unit	11.475.490.843,90	10.421.155.843,90
Peralatan Komputer	2.033.135.070,00	1.986.285.070,00
Alat Keselamatan Kerja	281.148.050,00	281.148.050,00
Alat Pelindung	9.442.298,00	9.442.298,00
Alat sar	224.705.752,00	224.705.752,00
Alat Kerja Penerbangan	47.000.000,00	47.000.000,00
Alat Peraga	14.400.000,00	14.400.000,00
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	14.400.000,00	14.400.000,00
Rambu-rambu	39.750.000,00	39.750.000,00
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	39.750.000,00	39.750.000,00
Gedung dan Bangunan	177.042.981.664,65	163.490.094.406,74
Bangunan Gedung	162.643.907.497,99	149.301.398.472,08
Bangunan Gedung Tempat Kerja	145.267.673.947,99	132.437.540.088,08
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	17.376.233.550,00	16.863.858.384,00
Monumen	1.493.092.000,00	1.493.092.000,00
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	1.493.092.000,00	1.493.092.000,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	12.905.982.166,66	12.695.603.934,66
Tugu/Tanda Batas	12.905.982.166,66	12.695.603.934,66
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.023.453.006,12	29.487.707.056,12
Jalan dan Jembatan	16.797.333.523,66	16.583.199.773,66
Jalan	13.187.339.491,91	12.973.205.741,91
Jembatan	3.609.994.031,75	3.609.994.031,75
Bangunan Air	8.929.764.267,20	8.720.394.967,20
Bangunan Air Irigasi	3.574.824.242,92	3.574.824.242,92
Bangunan Pengairan Pasang Surut	131.850.000,00	131.850.000,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	125.530.000,00	125.530.000,00
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	3.712.894.168,28	3.503.524.868,28
Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.267.400.052,00	1.267.400.052,00
Bangunan Air Kotor	117.265.804,00	117.265.804,00
Instalasi	1.677.137.110,00	1.664.672.110,00
Instalasi Air Bersih/Air Baku	330.727.310,00	318.262.310,00
Instalasi Gardu Listrik	1.268.909.800,00	1.268.909.800,00
Instalasi Pertahanan	77.500.000,00	77.500.000,00
Jaringan	2.619.218.105,26	2.519.440.205,26
Jaringan Air Minum	2.093.937.505,26	2.093.937.505,26
Jaringan Listrik	525.280.600,00	425.602.700,00
Aset Tetap Lainnya	2.996.081.629,31	2.996.081.629,31
Bahan Perpustakaan	1.520.597.285,00	1.520.597.285,00
Bahan Perpustakaan Tercetak	1.520.597.285,00	1.520.597.285,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	2.000.000,00	2.000.000,00
Barang Bercorak Kesenian	2.000.000,00	2.000.000,00
Hewan	928.905.000,00	928.905.000,00
Ternak	928.905.000,00	928.905.000,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	544.579.344,31	544.579.344,31
Aset Tetap Dalam Renovasi	544.579.344,31	544.579.344,31
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	4.537.558.376,41
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	4.537.558.376,41
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	4.537.558.376,41
Akumulasi Penyusutan	(273.140.122.736,35)	(268.063.426.866,63)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(217.813.353.237,92)	(212.747.548.955,09)
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(4.385.255.503,58)	(4.258.861.239,29)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(23.535.475.215,50)	(22.043.564.659,50)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(3.878.749.943,30)	(3.557.348.927,20)
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(140.987.728.672,25)	(140.784.599.239,50)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(25.003.875.627,00)	(23.906.723.771,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(1.431.969.043,60)	(1.239.145.262,40)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(124.323.105,00)	(112.317.705,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(5.884.441.506,50)	(5.380.254.447,75)
Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(107.900.000,00)	(107.900.000,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer	(12.138.336.571,19)	(11.021.535.653,45)
Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(281.148.050,00)	(281.148.050,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	(14.400.000,00)	(14.400.000,00)
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	(39.750.000,00)	(39.750.000,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(40.191.769.490,11)	(40.191.769.490,11)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(37.160.419.667,55)	(37.160.419.667,55)
Akumulasi Penyusutan Monumen	(240.392.520,00)	(240.392.520,00)
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(2.790.957.302,56)	(2.790.957.302,56)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(15.103.642.207,66)	(15.103.642.207,66)
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(11.761.194.139,25)	(11.761.194.139,25)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(1.826.647.705,45)	(1.826.647.705,45)
Akumulasi Penyusutan Instalasi	(439.319.314,33)	(439.319.314,33)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1.076.481.048,63)	(1.076.481.048,63)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(31.357.800,66)	(20.466.213,77)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	(31.357.800,66)	(20.466.213,77)
ASET LAINNYA	45.150.154.588,40	46.052.137.649,21
Aset Tidak Berwujud	2.688.231.000,00	2.613.231.000,00
Aset Tidak Berwujud	2.688.231.000,00	2.613.231.000,00
Aset Tidak Berwujud	2.688.231.000,00	2.613.231.000,00
Aset Lain-lain	43.096.654.588,40	44.073.637.649,21
Aset Lain-lain	43.096.654.588,40	44.073.637.649,21
Aset Lain-lain	6.545.249.983,00	6.545.249.983,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.	36.551.404.605,40	37.528.387.666,21
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(634.731.000,00)	(634.731.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(634.731.000,00)	(634.731.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(634.731.000,00)	(634.731.000,00)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
JUMLAH ASET	503.376.394.990,51	494.570.320.859,69
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	164.174.197,88	203.617.218,40
Pendapatan Diterima Dimuka	164.174.197,88	203.617.218,40
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	11.748.633,88	11.726.027,40
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	11.748.633,88	11.726.027,40
Utang Belanja	11.748.633,88	11.726.027,40
Utang Belanja Barang dan Jasa	152.425.564,00	191.891.191,00
Utang Belanja Jasa	152.425.564,00	191.891.191,00
JUMLAH KEWAJIBAN	164.174.197,88	203.617.218,40
EKUITAS	508.278.025.075,46	494.366.703.641,29
EKUITAS	508.278.025.075,46	494.366.703.641,29
Ekuitas	312.623.240.252,96	190.629.469.873,80
Ekuitas	494.366.703.641,29	497.793.711.976,00
Ekuitas	494.366.703.641,29	490.898.467.354,45
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	6.895.244.621,55
Surplus/Defisit-LO	(181.743.463.388,33)	(307.164.242.102,20)
Surplus/Defisit-LO	(181.743.463.388,33)	(307.164.242.102,20)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	195.654.784.822,50	303.737.233.767,49
RK PPKD	195.654.784.822,50	303.737.233.767,49
RK PPKD	195.654.784.822,50	303.737.233.767,49
JUMLAH EKUITAS DANA	508.278.025.075,46	494.366.703.641,29
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	508.442.199.273,34	494.570.320.859,69

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



Ir. Cut Huzaimah, MP

NIP. 19660217 199203 2 003

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh, bahwa Keuangan Aceh dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagai upaya perwujudan *good governance* serta taat azas, maka pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan.

Maksud penyusunan laporan keuangan ini adalah wujud pertanggungjawaban SKPA kepada Gubernur Aceh dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan SKPA melainkan untuk melaksanakan azas transparansi, efisiensi, efektifitas, serta fungsi pengawasan DPRA terhadap jalannya pemerintahan.

SKPA selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2023 untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPA entitas pelaporan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergeneration equity*)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan SKPA yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan

mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas SKPA atas sumber daya yang dipercayakan dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi serta pengalokasiannya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPA serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai pendanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPA dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi SKPA, berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPA, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, beban, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas SKPA.

Maka berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ada, Laporan Keuangan SKPA ini disusun sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2023.

Akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah diterapkan pada Tahun 2015. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5912);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
18. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 3)
19. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 6) dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 9).
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 51);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 46);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 47);
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan SKPA Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBA

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan, serta indikator pencapaian target kinerja APBA berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi dan Penerapannya

Memuat informasi tentang entitas akuntansi, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan, serta kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan atas akun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Operasional (LO); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan Neraca.

Bab VI Penjelasan Informasi-Informasi Non Keuangan

Kewajiban kontijensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian yang berdampak kepada kondisi keuangan SKPA yang baru terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Penyajian hasil indikator makro hasil pembangunan dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan dan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan apakah kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan selama ini telah sesuai dengan yang diharapkan.

Pencapaian indikator hasil pembangunan yang didapat disajikan dalam laporan keuangan tahun 2023, bersumber dari data BPS Provinsi Aceh. Capaian indikator makro hasil pembangunan didasarkan pada data yang disajikan oleh BPS Provinsi Aceh.

2.1.1 Pertanian

Salah satu subsektor pertanian adalah tanaman pangan. Subsektor ini mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Luas panen padi tahun 2022 adalah 276.622,14 Hektar. Berdasarkan data statistika terakhir, luas panen jagung tahun 2015 adalah sebesar 205.125 ton dan luas panen kedelai adalah sebesar 47.910 ton. Sedangkan luas panen kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar pada tahun 2014 mengalami penurunan masing-masing sebesar 19,76 persen, 10,75 persen, dan 17,46 persen dibandingkan tahun 2013.

Produksi tanaman sayuran pada tahun 2017 mencapai 2.225.028 kuintal. Produksi cabai rawit memberikan kontribusi paling tinggi yaitu sebesar 24,18 persen dari total produksi tanaman sayuran, kemudian disusul cabe besar dan kentang masing-masing sebesar 23,84 persen dan 21,55 persen. Sedangkan komoditi sayuran yang relatif rendah memberikan kontribusi adalah semangka dan bawang merah. Sedangkan komoditi buah-buahan yang memberikan kontribusi tertinggi adalah pisang mencapai 44,77 persen atau 67.308 ton, kemudian disusul durian sebesar 14,13 persen atau 21.240 ton serta rambutan dengan persentase sebesar 13,02 persen atau 19.567 ton.

Sub sektor perkebunan juga merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Aceh, yang diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan petani sekaligus melepaskan petani dari kemiskinan. Sub sektor Komoditas Perkebunan telah memberi sumbangan yang sangat berarti terhadap Perekonomian Nasional dan Daerah, karena mampu membuka peluang kerja yang cukup luas bagi masyarakat, disamping itu komoditas perkebunan merupakan andalan bagi Pendapatan Nasional dan Devisa Negara Indonesia.

Kontribusi sub sektor perkebunan Aceh, selama periode tahun 2010 s/d 2015 terhadap perekonomian nasional semakin meningkat dan diharapkan dapat memperkuat Pembangunan Perkebunan secara menyeluruh. Komoditi khusus tanaman Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Kopi, dan Kakao, (5K), dan Pala, Lada, Nilam, Cengkeh, Tebu (PLNCT) menjadi andalan tanaman perkebunan karena animo masyarakat dalam mengembangkan komoditi tersebut cenderung meningkat, kontribusi sub sektor dalam komoditi andalan perkebunan mengalami peningkatan dan secara perekonomian harga menguntungkan petani di bandingkan komoditas lainnya.

Data BPS tahun 2017 menunjukkan, luas tanam tanaman karet perkebunan rakyat 129.660 ha dengan produksi yang dihasilkan 66.671 ton, kelapa 101.642 ha dengan produksi

62.832 ton, kelapa sawit 234.479 ha dengan produksi 437.292 ton, kopi 123.749 ha dengan produksi 68.493 ton, serta luas tanam tanaman kakao perkebunan rakyat 101.230 ha dengan hasil produksi mencapai 39.296 ton.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Aceh, dalam hal ini pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mencakup kebijakan-kebijakan di bidang pengelolaan penerimaan dan penyetoran pendapatan serta pengelolaan pengeluaran/belanja. Di bidang penerimaan, target yang ditetapkan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp 900.098.120 (Sembilan Ratus Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah). Target ini menurun sedikit jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 993.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah). Target penerimaan yang paling besar diharapkan berasal dari pendapatan retribusi jasa usaha berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah, serta lain-lain pendapatan yang sah berupa pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan pendapatan BLUD. Sedangkan di bidang pengeluaran, anggaran belanja yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah Rp 212.313.160.979 (Dua Ratus Dua Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). Anggaran belanja ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 314.507.337.825,- (Tiga Ratus Empat Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) setelah DPA- perubahan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dalam rangka usaha pencapaian target kinerja pada tahun anggaran 2023, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh memiliki 6 program, dimana masing-masing program tersebut terdiri dari beberapa kegiatan.

Program/Kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang bersumber dari dana APBA tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
 - Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
- 3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
- 4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- 5) Program Perizinan Usaha Pertanian
- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
- 6) Program Penyuluhan Pertanian
- Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
 - Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta
 - Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
 - Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
 - Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani
 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Pendapatan	900.098.120	400.423.788,99	44,49
2	Belanja	212.313.160.979	196.014.238.994,64	92,32

Dari sisi penerimaan, target anggaran pendapatan yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 900.098.120,- jumlah ini menurun jika dibandingkan target pendapatan tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi pencapaian target pendapatan hanya berkisar 44,41%, yang berasal dari pendapatan retribusi jasa usaha berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah, serta lain-lain pendapatan yang sah berupa pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan pendapatan BLUD.

Realisasi pendapatan BLUD pada tahun 2023 hanya berkisar 11,56% diakibatkan banyaknya alsintan dalam kondisi yang tidak optimal dan tidak bisa disewakan , terutama berhubungan dengan kerusakan komponen penggerak rotavator.

Dari sisi pengeluaran, target anggaran belanja yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 212.313.160.979,- Jumlah ini menurun jika dibandingkan target belanja tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 314.507.337.825,- setelah perubahan. Sedangkan realisasi pencapaian target belanja berkisar 92,32%.

Realisasi belanja BLUD pada tahun 2023 hanya berkisar 0,23% yang merupakan belanja jasa Bank (pajak). Sedangkan yang lain tidak direalisasikan sama sekali.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum, pada tahun 2023 tidak ada hambatan dan kendala yang signifikan dalam realisasi anggaran, akan tetapi dengan adanya revisi di akhir tahun anggaran agak berdampak pada tidak maksimalnya kinerja di lapangan sehingga ada beberapa target yang tidak tercapai.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi mencakup entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada 2 entitas penyelenggara yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran, pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi pada Pemerintahan Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang berada di lingkup Pemerintah Aceh.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dalam upaya untuk meningkatkan akurasi dan validitas laporan keuangan yang disusun oleh setiap SKPA sebagai entitas akuntansi, maka SKPKA selain berfungsi sebagai entitas akuntansi juga bertindak sebagai PPKA selaku entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk masing-masing SKPA. Secara periodik, SKPKA melakukan rekonsiliasi dengan setiap SKPA atas laporan keuangan SKPA. Agar hasil rekonsiliasi yang kemudian disusun sebagai laporan keuangan dapat memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku, maka pedoman teknis yang mengatur akuntansi serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Pemerintah Aceh khususnya tahun anggaran 2023 telah diatur pada lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Aceh.

Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan ini adalah basis akrual (*accrual basis*) yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat pada Laporan Keuangan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak atau klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Aceh antara lain bersumber dari pajak, retribusi, hasil pemanfaatan kekayaan, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengakuan Kewajiban

diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengakuan Pendapatan-LO

Diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan Pendapatan-LRA

Diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Aceh

Pengakuan Beban

Diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Pengakuan Belanja

Diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Pengakuan Investasi

Diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Aceh; atau
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Keandalan Pengukuran, kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
- d) Persediaan dicatat sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan ekuitas.

Pengukuran Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Aceh pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang.

pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Kejadian yang diakui Pemerintah Aceh adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah Aceh karena pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Aceh mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Aceh sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah Aceh dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah Aceh secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah Aceh atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Pengukuran investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Aceh, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Kas dan Setara Kas

Definisi:

- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Aceh yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Investasi disebut

setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Klasifikasi:

- Kas dan Setara Kas diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.1.01	Kas dan Setara Kas			
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah	-	√
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor ke Rekening Kas Umum Aceh	√	-
		Kas di Bank Persepsi	√	-
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU	√	-
		Potongan PFK di SKPA yang Belum Disetor	√	-
		Jasa Giro Yang Belum Disetor	√	-
1.1.01.04	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD	√	-
		Kas di Bank BLUD	√	-
		Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor	√	-
		Potongan Non Pajak Yang Belum Disetor.	√	-
		Uang Muka Pelayanan BLUD	√	-
		Uang Transitoris BLUD	√	-
1.1.01.05	Kas Dana BOS	Kas Dana BOS	√	-
1.1.01.07	Kas Lainnya	Kas Lainnya	√	-
1.1.01.08	Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	√*	√
		Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)	-	√

- Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUA terdiri dari:
- a. Saldo rekening Kas Umum Aceh, yaitu saldo rekening pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh BUA.

Pengukuran:

- Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
- Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.
- Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Akuntansi Piutang

Definisi:

- Piutang adalah hak Pemerintah Aceh untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
- Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Klasifikasi:

- Piutang diklasifikasi sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1.1.03	Piutang Pajak Aceh	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	√
		Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	√
		Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	√
		Piutang Pajak Air Permukaan	√
		Piutang Pajak Rokok	-
		Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	√
1.1.04	Piutang Retribusi Aceh	Piutang Retribusi Jasa Umum	√
		Piutang Retribusi Jasa Usaha	√
		Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	√
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal pada BUMA	-
1.1.06	Piutang Lain-Lain PAA Yang Sah	Piutang Hasil Penjualan BMA Yang Tidak Dipisahkan	-
		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMA Yang Tidak Dipisahkan	-
		Piutang Hasil Pemanfaatan BMA Yang Tidak Dipisahkan	-
		Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	-
		Piutang Jasa Giro	-
		Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-
		Piutang Pendapatan Bunga	-
		Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-
		Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-
		Piutang Pendapatan Denda Pajak Aceh	√
		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Aceh	√
		Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	√
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian	√
		Piutang Pendapatan BLUD	√
		Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-
		Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana	-

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPA	SKPKA	
	Bergulir			
	Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)	√	√	
	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	√	√	
	Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	√	-	
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Piutang Dana Perimbangan	-	√
		Piutang Dana Insentif Daerah (DID)	-	√
		Piutang Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur	-	√
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	Piutang Bagi Hasil	-	√
		Piutang Bantuan Keuangan	-	√
1.1.09	Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	-	√
		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	-	√
		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	√
		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	√
		Uang Muka	-	√
1.1.10	Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Pendapatan	√	-
		Penyisihan Piutang Lainnya	√	-
1.1.11	Belanja Dibayar dimuka	Beban Pegawai Dibayar dimuka	√	-
		Beban Barang Dibayar dimuka	√	-
		Beban Jasa Dibayar dimuka	√	-
		Beban Pemerliharaan Dibayar dimuka	√	-
		Beban Lainnya	√	-

Piutang Pemerintah Aceh dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan
Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
 - 1) Piutang Pajak Aceh;
 - 2) Piutang Retribusi Aceh;
 - 3) Piutang Pendapatan Asli Aceh Lainnya.
- b. Perikatan
Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:
 - 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;
 - 3) Kemitraan;
 - 4) Pemberian fasilitas;
 - 5) Transaksi Dibayar Dimuka.
- c. Transfer antar Pemerintahan
Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;

- 5) Piutang Transfer Lainnya;
- 6) Piutang Kelebihan Transfer.

d. Tuntutan Ganti Kerugian

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian, terdiri atas:

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara.

e. Transaksi Dibayar Dimuka

Dalam hal terdapat perikatan antara Pemerintah Aceh dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana Pemerintah Aceh harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.

Pengakuan:

- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca.
- Piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang, yaitu dengan dokumen surat ketetapan tentang piutang atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan tentang piutang dan/atau dokumen surat penagihan yang sudah diterbitkan tetapi belum dilunasi.
- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran:

- Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
- Piutang dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

- Persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)
1	Piutang Pajak (<i>self assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
2	Piutang Pajak (<i>official assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
3	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Objek Retribusi	< 1bulan	≥ 1 s.d 3 bulan	> 3 s.d 12 bulan	> 12 bulan
4	Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi	Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo	1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama	1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua	1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga

- Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung menurut persentase masing-masing kualitas piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Piutang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi piutang.
Piutang yang telah dihapusbukukan tetap harus dipelihara pencatatannya secara ekstrascomptabel.

Akuntansi Persediaan

Definisi:

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Aceh, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi:

- Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.1.12	Persediaan			
1.1.12.01	Persediaan Barang Pakai Habis	Bahan	√	-
		Suku cadang	√	-
		Alat/bahan untuk kegiatan kantor	√	-
		Obat-obatan	√	-
		Persediaan untuk dijual/diserahkan	√	-
		Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	√	-
		Natura dan Pakan	√	-
		Persediaan Penelitian	√	-
		Persediaan Dalam Proses	√	-

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.1.12.02	Barang Tidak habis Pakai	Komponen	√	-
		Pipa	√	-
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	√	-

- Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- Dalam suatu transaksi keuangan dimana pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk tujuan cadangan strategis/berjaga-jaga, barang-barang yang diperoleh diakui sebagai persediaan. Sebagai contoh pemerintah membeli bahan bakar minyak sebagai cadangan energi dan membeli beras untuk cadangan pangan. Begitu juga dengan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.
- Persediaan dapat terdiri dari:
 - a. Barang Konsumsi;
 - b. Amunisi;
 - c. Bahan untuk pemeliharaan;
 - d. Suku cadang;
 - e. Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
 - f. Pita cukai dan leges;
 - g. Bahan baku;
 - h. Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i. Tanah/bangunan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat; dan
 - j. Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.

Pengakuan:

- Persediaan diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.
- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak diakui sebagai persediaan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan Beban Persediaan:

- Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.
- Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
- Terdapat dua pendekatan Pengakuan Beban Persediaan, yaitu:
 - a. Pendekatan aset
Beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga, antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPA.
 - b. Pendekatan beban.
Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode, antara lain adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Selisih Persediaan:

- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stok opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran:

- Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga/rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan persediaan adalah:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi usang atau rusak.

Akuntansi Investasi

Definisi:

- Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Aceh untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Klasifikasi:

- Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.1.02	Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham	-	√
		Investasi dalam Deposito	-	√
		Investasi dalam Surat Utang Negara (SUN)	-	√
		Investasi dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-	√
		Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	-	√
		Investasi Jangka Pendek BLUD	-	√
		Investasi Jangka Pendek Lainnya	-	√

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	-	√
		Investasi kepada Badan Usaha Milik Aceh (BUMA)	-	√
		Investasi dalam Obligasi	-	√
		Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	√
		Dana Bergulir	-	√
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal	-	√
		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	-	√

- Investasi diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Aceh dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya beresiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengakuan:

- Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memungkinkan Pemerintah Aceh memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengukuran:

- Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Investasi jangka pendek disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi investasi.

- Investasi jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi nonpermanen dan investasi permanen sesuai klasifikasi investasi.

Akuntansi Dana Bergulir

Definisi:

- Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Klasifikasi:

- Dana Bergulir yang disisihkan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan masyarakat, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen.
- Alokasi anggaran untuk Dana Bergulir dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada DPA-PPKA, dan aset yang diperoleh dari Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang non permanen. Penagihan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai Penerimaan Pembiayaan, apabila dimaksudkan akan digulirkan kembali.

Pengakuan:

- Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Aceh yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
- Dana Bergulir disalurkan oleh Pemerintah Aceh kepada masyarakat dan dikembalikan kepada Pemerintah Aceh untuk selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat. Dana Bergulir dialokasikan pada pos Pengeluaran Pembiayaan dan penagihannya pada pos Penerimaan Pembiayaan. Dana tersebut dilaporkan sebagai Investasi Dana Bergulir pada neraca Pemerintah Aceh.
- Apabila dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui SKPA dan menggunakan nomenklatur "Dana Bergulir", namun secara substansi dana tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir, maka pada neraca tidak dapat dikategorikan sebagai Investasi Dana Bergulir.
- Pengembalian dana kepada pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus.
- Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat dapat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil.
- Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian.

Pengukuran:

- Pemerintah Aceh mencatat adanya perolehan aset berupa dana bergulir sebesar perolehan atau pengeluaran pembiayaan.
- Pemerintah Aceh secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.
- Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Dana Bergulir disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi dana bergulir.
- Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari

dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir

- Pendapatan hasil dari pengelolaan dana bergulir yang diterima oleh Pemerintah Aceh disajikan sebagai Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LRA.

Akuntansi Aset Tetap

Definisi:

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Aceh atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi:

- Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.3.01	Tanah	Tanah Persil	√	-
		Tanah Non Persil	√	-
		Lapangan	√	-
		Tanah BLUD	√	-
1.3.02	Peralatan dan mesin	Alat Besar	√	-
		Alat Angkutan	√	-
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	√	-
		Alat Pertanian	√	-
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	√	-
		Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	√	-
		Alat Kedokteran dan Kesehatan	√	-
		Alat Laboratorium	√	-
		Alat Persenjataan	√	-
		Komputer	√	-
		Alat Eksplorasi	√	-
		Alat Pengeboran	√	-
		Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	√	-
		Alat Bantu Eksplorasi	√	-
		Alat Keselamatan Kerja	√	-
		Alat Peraga	√	-
		Peralatan Proses/Produksi	√	-
		Rambu-rambu	√	-
		Peralatan Olahraga	√	-
1.3.03	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung	√	-
		Monumen	√	-
		Bangunan Menara	√	-
		Tugu Titik Kontrol/Pasti	√	-
1.3.04	Jalan, jaringan dan irigasi	Jalan dan Jembatan	√	-
		Bangunan Air	√	-
		Instalasi	√	-
		Jaringan	√	-
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	√	-
		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	√	-
		Hewan	√	-
		Biota Perairan	√	-

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
	Barang Koleksi Non Budaya	√	-
	Aset Tetap Dalam Renovasi	√	-
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	√	-
1.3.07	Akumulasi Penyusutan		
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	√	-
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	√	-
	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	√	-
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	√	-

- Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.
- Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Aceh serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
- Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.
- Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Pengakuan:

- Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBA) maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat SP2D telah diterbitkan dan telah ada berita acara serah terima.
- Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Tanah:

- Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
- Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Aceh yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Aceh, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Peralatan dan Mesin:

- Peralatan dan mesin dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
- Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Pengakuan Peralatan dan Mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Gedung dan Bangunan:

- Gedung dan Bangunan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi dan lainnya.
- Gedung dan Bangunan yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Perolehan Gedung dan Bangunan pada umumnya dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- Gedung dan Bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Jalan, Irigasi dan Jaringan:

- Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, hibah/donasi, dan lainnya.
- Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, irigasi dan Jaringan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Aset Tetap Lainnya:

- Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya diperoleh melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
- Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengukuran:

- Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Komponen biaya perolehan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	• Biaya perolehan tanah meliputi biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya perolehan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. • Perolehan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan, termasuk dalam harga perolehan tanah tersebut adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
Peralatan dan Mesin	Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	• Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk perencanaan, pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya seperti biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. • Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, perizinan, jasa konsultan dan pajak.
Jalan, Irigasi dan Jaringan.	Biaya perolehan atau biaya konstruksi jalan irigasi dan jaringan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya konsultan, biaya pembongkaran diatas tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	• Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan, pengawasan, sewa peralatan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak. • Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, biaya perizinan dan pajak.

Tanah:

- Pengukuran aset tetap harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Aset tetap berupa tanah, seluruh nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
- Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.
- Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Peralatan dan Mesin:

- Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (*appraisal*) dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan

yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memakai perhitungan teknis.

Gedung dan Bangunan:

- Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan:

- Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Aset Tetap Lainnya:

- Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan serta hewan/ternak dan tumbuhan tidak dikapitalisasi.

Konstruksi Dalam Pengerjaan:

- Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Perolehan Secara Gabungan:

- Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran Aset:

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset Donasi:

- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan:

- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Penimbunan tanah yang dilakukan setelah tanah siap digunakan dan sudah dibangun gedung diatas tanah tersebut serta tidak menambah manfaat ekonomi tanah, maka

penimbunan dimaksud tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan.

- Pembangunan area parkir di atas tanah dan penimbunan tanah yang dimaksudkan untuk pembuatan taman tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan, melainkan menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan.

Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal:

- Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan:

- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Pemerintah Aceh adalah metode garis lurus (straight line method).
- Aset Tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya tidak perlu dilakukan penyusutan, yaitu aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai pada awal tahun berikutnya setelah tahun perolehan.
- Dalam penyusunan neraca Pemerintah Aceh, perhitungan penyusutan aset tetap dapat dilaksanakan secara bertahap menurut jenis aset tetap. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali aset tetap, maka penyusutan disajikan dengan penyesuaian pada akun akumulasi penyusutan aset tetap.
- Aset Tetap tidak diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut merupakan aset lama yang baru terdata dan tercatat pada buku inventaris barang, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya namun harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Bersejarah:

- Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Pelepasan:

- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.
- Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan, (1) Penambahan, (2) Pelepasan, (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, (4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi: (1) Nilai penyusutan, (2) Metode penyusutan yang digunakan, (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 - d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 - e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Definisi:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Klasifikasi:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tanah Dalam Pengerjaan	√	-
		Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	√	-
		Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	√	-
		Jalan, Jaringan dan Irigasi Dalam Pengerjaan	√	-
		Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	√	-

- Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Pengakuan:

- Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Pengukuran:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, yaitu dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Untuk keperluan neraca awal, dokumen sumber untuk mencatat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai SP2D yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap.
- Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan;
 - e. Retensi.
 - f. Apabila Kontruksi Dalam Pengerjaan tidak dilanjutkan (dihentikan sementara atau akan dihentikan permanen) harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Jika penanggung jawab aset (dalam hal ini adalah Gubernur) mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut secara permanen, maka harus diterbitkan Surat Keputusan Gubernur terkait penghapusan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Akuntansi Dana Cadangan

Definisi:

- Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Klasifikasi:

- Dana Cadangan diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Dana Cadangan

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.4.1.01	Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Gedung	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Waduk	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional	-	√
		Dst....	-	√

- b. Penerimaan hasil Pengelolaan Dana Cadangan.

Kode Rekening		Uraian Akun		Kewenangan	
LRA	LO			SKPA	PPKA
4.1.4.03	8.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro	Penerimaan Jasa Giro Dana Cadangan....	√	√
4.1.4.04	8.1.4.04	Pendapatan Bunga	Pendapatan Bunga Deposito	√	√

Pengakuan:

- Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Aceh ke Rekening Dana Cadangan yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
- Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Qanun Aceh yang didalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - d. Sumber dana cadangan; dan
 - e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
 - Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
 - Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada program kegiatan yang sudah direncanakan dalam Qanun Aceh.

Pengukuran:

- Pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- Hasil pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Dana Cadangan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset.
- Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan dan dikapitalisasi ke dana cadangan.
- Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, jasa giro/bunga, dana cadangan, dan Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LO dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, jasa giro/bunga, dana cadangan.

Akuntansi Aset Lainnya

Definisi:

- Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Aceh yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Klasifikasi:

- Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.5.1	Tagihan jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran	√	√
		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	√	√
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa	√	√
		Kerjasama Pemanfaatan	√	√
		Bangun Guna Serah	√	√
		Bangun Serah Guna	√	√
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	Goodwill	√	-
		Lisensi dan Frenchise	√	-
		Hak Cipta	√	-
		Paten	√	-
		Aset Tidak Berwujud Lainnya	√	-
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	√	-
1.5.4	Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain	√	√

Pengakuan:

- Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:
 - a. Tagihan Jangka Panjang

- 1) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Aceh secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan dinas dan penjualan rumah golongan III.
- 2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Aceh oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Aceh diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
 - 1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
 - 2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Aceh oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-KSP.
- c. Aset Tidak Berwujud (ATB)
Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:
 - 1) Software
Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.
 - 2) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
 - 3) Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
 - 4) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran:

- Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a. Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
Kerja Sama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- Aset Tidak Berwujud
Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Aceh untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Aceh tersebut.
- Aset Lain-lain
Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Amortisasi:

- Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
- Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
- Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Aset Lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya.
- Pengungkapan Aset Lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Besaran dan rincian aset lainnya;
 - b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
 - c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, *BOT* dan *BTO*);
 - d. Informasi lainnya yang penting.

Akuntansi Kewajiban

Definisi:

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Aceh. Kewajiban Pemerintah Aceh dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada

pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi:

- Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
2.1	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	√	-
2.1.2	Utang Bunga	√	√
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	√	√
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	√	-
2.1.5	Utang Belanja	√	√
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	√	√
2.2	Kewajiban Jangka Panjang		
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	√
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	√

- Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan:

- Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.
- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Aceh dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Aceh.
- Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Aceh memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.
- Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dalam suatu ketentuan perundangan penyaluran alokasinya belum dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila dalam ketentuan tersebut tidak jelas dinyatakan sebagai transaksi utang-piutang.
- Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah dan dicatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pengukuran:

- Kewajiban Pemerintah Aceh dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Aceh dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)
 - 1) Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Aceh menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Aceh mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
 - 2) Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.
 - b. Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban Pemerintah Aceh untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 - d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
 - 2) Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Aceh harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan bila masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetor kepada pihak lain, maka jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 - e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 - f. Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari kewajiban sesuai klasifikasi kewajiban.
- Utang Pemerintah Aceh harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Akuntansi Pendapatan

Definisi:

- Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Aceh yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Aceh, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Aceh

Klasifikasi:

- Pendapatan Asli Aceh (PAA).
- Pendapatan Transfer.

- Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah.

Pengakuan:

- Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 - timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 - pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 - pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Aceh, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, diakui sebagai Pendapatan-LO ketika periode yang bersangkutan telah terlalui.
- Pendapatan Retribusi diakui sebagai Pendapatan-LO ketika pembayaran telah diterima.
- Denda keterlambatan atas pekerjaan diakui sebagai realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah pada SKPA terkait.
- Pendapatan Zakat diakui sebagai Pendapatan-LO ketika telah dilakukan penyetoran ke rekening Kas Umum Aceh.
- Pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan namun dilakukan penyetoran realisasinya, diakui sebagai realisasi pendapatan SKPA terkait sesuai klasifikasi pendapatan tersebut.
- Pendapatan-LRA yang tidak diketahui sumber dan klasifikasinya diakui sebagai realisasi pada jenis Pendapatan Lainnya, kelompok Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah, objek Pendapatan Aceh Lainnya pada PPKA.
- Pendapatan-LRA dari pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai realisasi pada jenis Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, objek Pendapatan Lain-lain.
- Pendapatan diakui sebagai Pendapatan-LO sekaligus diakui sebagai Pendapatan-LRA apabila dalam proses transaksi pendapatan tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas.
- Pendapatan pada Bendahara Penerima yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Aceh dikategorikan sebagai pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran:

- Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian Dan Pengungkapan:

- Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis Pendapatan-LO sesuai klasifikasi dalam pendapatan.
- Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

Akuntansi Beban dan Belanja

Definisi:

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Aceh yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Aceh.

Klasifikasi:

- Beban diklasifikasikan sebagai berikut:

Uraian Akun		Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
8.1	Beban Operasi – LO		
8.1.01	Beban Pegawai	√	-
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	√	-
8.1.03	Beban Bunga	-	√
8.1.04	Beban Subsidi	√	√
8.1.05	Beban Hibah	√	√
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	√	√
8.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi		
8.2.01	Beban Penyusutan Peralatan Mesin	√	-
8.2.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	√	-
8.2.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, Irigasi	√	-
8.2.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	√	-
8.2.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya	√	√
8.2.06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	√	√
8.3	Beban Transfer		
8.3.01	Beban Bagi Hasil	-	√
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	-	√
8.4	Beban Tak Terduga		
8.4.01	Beban Tak Terduga	-	√
8.5	Beban Defisit Non Operasional		
8.5.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	√	√
8.5.02	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	√

- Belanja diklasifikasikan sebagai berikut:

Uraian Akun		Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
5.1	Belanja Operasi		
5.1.01	Belanja Pegawai	√	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	√	
5.1.03	Belanja Bunga	-	√
5.1.04	Belanja Subsidi	√	√
5.1.05	Belanja Hibah	√	√
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	√	√
5.2	Belanja Modal		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	√	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	√	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	√	-

Uraian Akun		Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	√	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	√	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	√	-
5.3	Belanja Tak Terduga		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	-	√
5.4	Belanja Transfer		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	√
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	√

Pengakuan:

- Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Aceh tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Aceh. Contoh tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar.
 - b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Aceh.
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
- Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh untuk seluruh transaksi di SKPA dan PPKA setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUA.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPA.
 - c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:
 - a. Metode pendekatan Beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.
 - b. Metode pendekatan Aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.
- Beban Pegawai diakui pada saat:
 - a. diterbitkan SP2D (seperti beban gaji dan tunjangan yang pembayarannya melalui mekanisme LS);
 - b. ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran (seperti honorarium non PNS yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU).
- Beban Barang dan Jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.
- Beban Hibah diakui pada saat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

- Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran Belanja Bantuan Sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.
- Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.
- Beban Transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Aceh.

Pengukuran:

- Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
- Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Aceh dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Beban disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis beban sesuai klasifikasi ekonomi (line item).
- Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

Akuntansi Transfer

Definisi:

- Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

Klasifikasi:

- Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota.
 - b. Transfer/Bantuan Keuangan.

Pengakuan:

- Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh, ditandai dengan terbitnya SP2D.

Pengukuran:

- Transfer diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian Dan Pengungkapan:

- Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis transfer sesuai klasifikasi transfer.

Akuntansi Pembiayaan

Definisi:

- Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Aceh, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Aceh antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

- Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Aceh antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Aceh, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Klasifikasi:

- Pembiayaan diklasifikasi sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengakuan:

- Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Aceh.
- Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Aceh.
- Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pembiayaan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran:

- Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi pembiayaan.

Akuntansi Koreksi Kesalahan

Definisi:

- Koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi:

- Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan tidak berulang; merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:
 - 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
 - b. Kesalahan berulang; merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.

Perlakuan:

- Kesalahan tidak berulang
 - a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.
- Kesalahan berulang
Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
 - Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
 - Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
 - Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan

Realisasi 2023 Realisasi 2022
Rp 400.423.788,99 Rp 609.599.170,50

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 400.423.788,99 atau 44,49% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 900.098.120,- Rincian pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1. Realisasi Anggaran Pendapatan TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			TA 2023	TA 2022	
1	Retribusi Daerah	500.098.120	334.248.420	453.098.120	66,84
2	Lain-lain PAD yang sah	400.000.000	66.175.368,99	156.501.050,50	16,54
Jumlah Pendapatan		900.098.120	400.423.788,99	609.599.170,50	44,49

Sumber: LRA 2023

Pendapatan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 400.423.788,99 merupakan pendapatan dari retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 334.248.420,- merupakan pendapatan dari retribusi jasa usaha melalui pemakaian kekayaan daerah, tempat penginapan/pesanggrahan/villa serta retribusi penjualan produksi usaha daerah. Sedangkan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 66.175.368,99 merupakan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan pendapatan yang berasal dari BLUD.

Realisasi pendapatan BLUD UPTD Mekanisasi Pertanian sebesar Rp 46.237.429,99 atau 11,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp 400.000.000,- hal ini disebabkan banyaknya alat dan mesin pertanian yang tidak bisa optimal bekerja akibat kerusakan sehingga tidak layak untuk disewakan terutama terkait dengan komponen penggerak rotavator.

Pendapatan tersebut dipungut sebagaimana diatur dalam Qanun Pajak/Retribusi Aceh dan sumber pendapatan Aceh guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Aceh.

5.1.2. Belanja

Realisasi 2023 Realisasi 2022
Rp 196.014.238.994,64 Rp 304.247.232.168,49

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 196.014.238.994,64 atau 92,32% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 212.313.160.979,- Rincian belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2. Realisasi Anggaran Belanja TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			TA 2023	TA 2022	
1	Belanja Operasi	186.917.756.345	181.149.187.753,14	292.308.057.091,36	96,91
2	Belanja Modal	25.395.404.634	14.865.051.241,50	11.939.175.077,13	58,53
Jumlah Belanja		212.313.160.979	196.014.238.994,64	304.247.232.168,49	92,32

Sumber: LRA 2023

5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi 2023
Rp 181.149.187.753,14

Realisasi 2022
Rp 292.308.057.091,36

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat direalisasikan sebesar Rp 181.149.187.753,14 atau 96,91% dari rencana yang sebesar Rp 186.917.756.345,- Rincian belanja operasi sebagai berikut:

Tabel 5.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			TA 2023	TA 2022	
1	Belanja Pegawai	70.254.163.343	69.499.211.599	72.259.648.883	98,93
2	Belanja Barang dan Jasa	116.663.593.002	111.649.976.154,14	220.048.408.208	95,70
3	Belanja Subsidi				
4	Belanja Hibah				
5	Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi		186.917.756.345	181.149.187.753,14	292.308.057.091,36	96,91

Sumber: LRA 2023

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi 2023
Rp 69.499.211.599

Realisasi 2022
Rp 72.259.648.883

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 69.499.211.599 atau 38,37% dari total realisasi Belanja Operasi.

Tabel 5.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022

No	Rincian	Anggaran	TA 2023	TA 2022	%
1	Gaji dan Tunjangan	39.962.214.309	39.877.369.481	41.118.183.726	99,79
2	Tambahan Penghasilan PNS	28.210.611.034	28.141.244.618	30.265.565.157	99,75
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.481.338.000	1.480.597.500	875.900.000	99,95
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD				
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH				
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH				
7	Belanja Pegawai BOS				
8	Belanja Pegawai BLUD *	600.000.000	-	-	
Jumlah		70.254.163.343	69.499.211.599	72.259.648.883	98,93

Sumber: LRA 2023

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi 2023
Rp 111.649.976.154,14

Realisasi 2022
Rp 220.048.408.208

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barang-barang dan jasa yang digunakan dalam masa satu tahun anggaran operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 111.649.976.154,14 atau 61,63% dari total Belanja Operasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan TA 2022

No	Rincian	Anggaran	TA 2023	TA 2022	%
1	Belanja Barang Pakai Habis	79.222.641.930	78.101.988.691	172.688.900.823	98,59
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	2.250.000	
3	Belanja Jasa Kantor	17.204.653.696	17.021.476.110	24.114.496.602	98,94
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	57.780.000	54.770.625	200.613.375	94,79
5	Belanja Sewa Tanah	22.200.000	22.200.000	-	100

No	Rincian	Anggaran	TA 2023	TA 2022	%
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	302.771.200	293.133.000	107.450.150	96,82
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.091.338.000	1.826.948.000	3.654.424.000	87,36
8	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi				
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10.089.900	9.657.000		95,71
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	342.594.285	
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	150.000.000	
12	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)				
13	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				
14	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.750.000	30.750.000	117.320.000	100
15	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah				
16	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah				
17	Belanja Pemeliharaan Tanah				
18	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.364.834.857	3.339.046.668	4.656.505.176	99,23
19	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	679.674.652	679.546.902	900.167.989,36	99,98
20	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81.569.000	81.569.000	24.847.350	100
21	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				
22	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.163.631.517	10.053.264.095	12.963.957.458	90,05
23	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri				
24	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	131.658.250	130.358.250	124.881.000	99,91
25	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
26	Belanja Barang dan Jasa BOS				
27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.300.000.000	5.267.813,14	-	
	Jumlah	116.663.593.002	111.649.976.154,14	220.048.408.208	95,70

Sumber: LRA 2023

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi 2023

Realisasi 2022

Rp 14.865.051.241,50

Rp 11.939.175.077

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 14.865.051.241,50 atau 58,53% dari anggaran sebesar Rp 25.395.404.634- Rincian Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Anggaran %
1	Belanja Tanah	-	-	-	
2	Belanja Peralatan dan Mesin	9.808.018.748	5.388.531.410	2.603.652.590	54,94
3	Belanja Gedung dan Bangunan	9.393.042.458	9.176.586.081,50	7.937.168.037,13	97,70
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	224.979.750	224.933.750	448.354.450	99,98
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.969.363.678	75.000.000	950.000.000	1,26
	Jumlah Belanja Modal	25.395.404.634	14.865.051.241,50	11.939.175.077,13	58,53

Sumber: LRA 2023

5.1.2.2.1. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi 2023

Realisasi 2022

Rp 5.388.531.410

Rp 2.603.652.590

Belanja Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin, mencakup belanja modal pengadaan alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat

pengolahan pertanian dan perternakan, peralatan kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, peralatan dan perlengkapan olah raga. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 5.388.531.410 atau mempunyai porsi sebesar 36,25% dari total realisasi Belanja Modal.

Rincian belanja peralatan dan mesin TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 7. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Anggaran	TA 2023	TA 2022	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	-	-	-	
2	Belanja Modal Alat Bantu	181.000.000	179.248.350	-	99,03
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	115.000.000	
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				
5	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor				
6	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin				
7	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	-	-	11.322.000	
8	Belanja Modal Alat Ukur	72.312.024	64.709.120	12.987.000	89,49
9	Belanja Modal Alat Pengolahan	6.286.650.898	2.102.030.000	80.444.000	33,44
10	Belanja Modal Alat Kantor	57.000.000	56.541.560	187.190.000	99,20
11	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	731.184.500	706.121.980	919.684.490	96,57
12	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	17.850.000	17.850.000	38.350.000	100
13	Belanja Modal Alat Studio	269.019.850	258.685.400	333.804.500	96,16
14	Belanja Modal Alat Komunikasi			5.900.000	
15	Belanja Modal Peralatan Pemancar				
16	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi				
17	Belanja Modal Alat Kedokteran				
18	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum				
19	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.161.751.476	1.012.280.000	-	87,13
20	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir				
21	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah				
22	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika				
23	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan				
24	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup				
25	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica				
26	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi				
27	Belanja Modal Komputer Unit	984.400.000	944.215.000	741.053.000	95,92
28	Belanja Modal Peralatan Komputer	46.850.000	46.850.000	131.877.000	100
29	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika				
30	Belanja Modal Sumur				
31	Belanja Modal Alat Pelindung				
32	Belanja Modal Alat SAR			26.040.600	
33	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan				
34	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan				
35	Belanja Modal Peralatan Olahraga				
36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				
Jumlah		9.808.018.748	5.388.531.410	2.603.652.590	54,94

Sumber: LRA 2023

5.1.2.2.2. Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi 2023
Rp 9.176.586.081,50

Realisasi 2022
Rp 7.937.168.037,13

Belanja Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang dipakai dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi yang siap pakai antara lain gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas, gudang, monumen, tower/menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan dan fasilitas umum lainnya. Realisasi belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 9.176.586.081,50 atau 61,73% dari total realisasi belanja modal.

Rincian Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.878.542.458	8.664.210.915,50	7.937.168.037	97,59
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	514.500.000	512.375.166	-	99,59
4	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti				
5	Belanja Modal Bangunan Menara				
Jumlah		9.393.042.458	9.176.586.081,50	7.937.168.037	97,70

Sumber: LRA 2023

5.1.2.2.3. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi 2023
Rp 224.933.750

Realisasi 2022
Rp 448.354.450

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup biaya yang dikeluarkan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap pakai. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 224.933.750 atau 1,51% dari total realisasi belanja modal yang digunakan untuk pengadaan konstruksi jalan, kontruksi jaringan air, dan jaringan instalasi listrik, dan jaringan instalasi telpon.

Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Jalan	214.133.750	214.133.750	-	100
2	Belanja Modal Jembatan	-	-	448.354.450	-
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi				
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam				
5	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah				
6	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	10.846.000	10.800.000	-	99,58
7	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku				
8	Belanja Modal Instalasi Air Kotor				
9	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah				
10	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan				
11	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik				
12	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik				
13	Belanja Modal Instalasi Gas				
Jumlah		224.979.750	224.933.750	448.354.450	99,98

Sumber: LRA 2023

5.1.2.2.4. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi 2023
Rp 75.000.000

Realisasi 2022
Rp 950.000.000

Belanja Aset tetap Lainnya mencakup biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Realisasi belanja aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 75.000.000 atau 0,50% dari total realisasi Belanja Modal, yang meliputi barang seni dan budaya, buku perpustakaan serta dan tanaman dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.10. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Anggran	TA 2023	TA 2022	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak				
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro				
3	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan				
4	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian				
5	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan				
6	Belanja Modal Tanda Penghargaan				
7	Belanja Modal Tanaman				
8	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	75.000.000	75.000.000	950.000.000	100
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS				
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	5.894.363.678	-	-	-
	Jumlah	5.969.363.678	75.000.000	950.000.000	

Sumber: LRA 2023

5.1.3. Surplus/Defisit

Realisasi 2023

Rp (195.613.815.205,65)

Realisasi 2022

Rp (303.637.632.997,99)

Berdasarkan hasil realisasi total Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 400.423.788,99 dan realisasi total Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 196.014.238.994,64 Laporan Keuangan mengalami (Surplus/Defisit) sebesar Rp (195.613.815.205,65)

5.2. Laporan Operasional

5.2.1. Pendapatan– LO

Tahun 2023

Rp 400.401.182,51

Tahun 2022

Rp 611.358.074,61

Pendapatan - LO Tahun 2023 mencapai Rp 400.401.182,51 Rincian pendapatan - LO tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.11. Kenaikan/Penurunan Pendapatan-LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1.	Pendapatan Asli Aceh-LO	400.401.182,51	611.358.074,61	-210.956.892	-34,51
2.	Pendapatan Transfer-LO				
3.	Lain-lain Pendapatan yang sah-LO				
	Jumlah	400.401.182,51	611.358.074,61	-210.956.892	-34,51

Sumber: LO 2023

Tabel 5.12. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Retribusi -LO

NO	URAIAN	PENDAPATAN LRA	PIUTANG TA 2023	PENYETORAN PIUTANG TA 2021 (tambahkan kolom bila ada penyetoran piutang tahun lainnya)	PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA TA 2023	PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA TA 2022	PENDAPATAN LO
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5-6+7
Retribusi Jasa Umum							
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan						-
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan						-
3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta						-
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan						-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-
Retribusi Jasa Usaha							
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	334.248.420					334.225.813,52
2	Retribusi Tempat Pelelangan						162.975.813,52
3	Retribusi Terminal						-
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir						-
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	36.420.000					36.420.000
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan						-
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga						-
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	134.830.000					134.830.000
	JUMLAH	334.248.420	-	-	-	-	334.225.813,52
Retribusi Perizinan Tertentu							
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum						-
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan						-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	334.248.420	-	-	-	-	334.225.813,52

Pendapatan Retribusi-LRA sebesar Rp 334.248.420 dan Pendapatan Retribusi -LO sebesar Rp 334.225.813,52 terdapat selisih sebesar Rp 22.606,48 yang merupakan selisih dari jurnal penghapusan di tahun lalu dengan yang diinput pada tahun berjalan.

5.2.2. Beban Operasi

Tahun 2023
Rp 191.631.235.530,51

Tahun 2022
Rp 306.700.369.280,81

Beban Operasi Tahun 2023 mencapai Rp 191.631.235.530,51 Rincian beban tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.13 Kenaikan/Penurunan Beban Operasi-LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Pegawai	69.499.211.599	72.259.648.883	-2.760.437.284	-3.82
2	Beban Persediaan	78.134.671.968	172.682.561.221	-94.547.889.253	-54.75
3	Beban Jasa	19.224.736.921,14	28.376.009.306	-9.151.272.385	-32.25
4	Beban Pemeliharaan	4.100.162.570	5.251.662.526	-1.151.499.956	-21.93
5	Beban Perjalanan Dinas	10.053.264.095	12.963.957.458	-2.910.693.363	-22.45
6	Beban Subsidi				
7	Beban Hibah	130.358.250	124.881.000	5.477.250	4.39
8	Beban Bantuan Sosial				
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	10.488.830.127,37	15.041.648.886,81	-4.552.818.759	-30.27
10	Beban Penyisihan Piutang				
11	Beban lain-lain				
Jumlah Beban Operasi		191.631.235.530,51	306.700.369.280,81	-115.069.133.750	-37.52

Sumber: LO 2023

5.2.2.1. **Beban Pegawai**

Tahun 2023
Rp 69.499.211.599

Tahun 2022
Rp 72.259.648.883

Tabel 5.14 Kenaikan/Penurunan Beban Pegawai-LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	39.877.369.481	41.118.183.726	-1.240.814.245	-3.02
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	28.141.244.618	30.265.565.157	-2.124.320.539	-7.02
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.480.597.500	875.900.000	604.697.500	69.04
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD				
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH				
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH				
7	Belanja Pegawai BOS				
Jumlah		69.499.211.599	72.259.648.883	-2.760.437.284	-3.82

Sumber: LO 2023

Tidak ada selisih pada Belanja Pegawai-LRA dan Beban Pegawai-LO, yaitu sebesar Rp 69.499.211.599.

5.2.2.2. **Beban Persediaan**

Tahun 2023
Rp 78.134.671.968

Tahun 2022
Rp 172.682.561.221

Tabel 5.15 Kenaikan/Penurunan Beban Persediaan-LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Barang Pakai Habis **(rincikan)	78.134.671.968	172.680.311.221	-94.545.639.253	-54.75
2	Beban Barang Tak Habis Pakai **(rincikan)	0	2.250.000	-2.250.000	-100
3	Beban Barang Bekas Dipakai **(rincikan)				
Total Beban Persediaan		78.134.671.968	172.682.561.221	-94.547.889.253	-54.75

Sumber: LO 2023

5.2.2.3. **Beban Jasa**

Tahun 2023
Rp 19.224.736.921,14

Tahun 2022
Rp28.376.009.306

Tabel 5.16 Kenaikan/Penurunan Beban Jasa-LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Jasa Kantor	16.987.278.296,14	24.146.201.781	-7.158.923.485	-29.65
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	54.770.625	200.613.375	-145.842.750	-72.70
3	Beban Sewa Tanah	22.200.000		22.200.000	0
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	293.133.000	107.450.000	185.682.850	172.81
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.826.948.000	3.654.424.000	-1.827.476.000	-50.01
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi				
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	9.657.000		9.657.000	0
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi		-		
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	150.000.000	-150.000.000	-100
10	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)		-		
11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS				
12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.750.000	117.320.000	-86.570.000	-73.79
Jumlah		19.224.736.921,14	28.376.009.306	-9.151.272.385	-32.25

Sumber: LO 2023

5.2.2.4. **Beban Pemeliharaan**

Tahun 2023
Rp 4.100.162.570

Tahun 2022
Rp 5.251.662.526

Tabel 5.17. Kenaikan/Penurunan Beban Pemeliharaan-LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah		-		
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.339.046.668	4.565.505.176	-1.317.458.508	-28.29
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	679.546.902	570.310.000	109.236.902	19.15
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	81.569.000	24.847.350	56.721.650	228.28
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				
	Jumlah	4.100.162.570	5.251.662.526	-1.151.499.956	-21.93

Sumber: LO 2023

5.2.2.5. **Beban Perjalanan Dinas**

Tahun 2023
Rp 10.053.264.095

Tahun 2022
Rp 12.963.957.458

Tabel 5.18. Kenaikan/Penurunan Beban Perjalanan Dinas-LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	10.053.264.095	12.963.957.458	-2.910.693.363	-22.45
2	Beban perjalanan dinas luar daerah				
3	Beban perjalanan dinas luar negeri				
	Jumlah	10.053.264.095	12.963.957.458	-2.910.693.363	-22.45

Sumber: LO 2023

5.2.2.6. **Beban Hibah**

Tahun 2023
Rp 130.358.250

Tahun 2022
Rp 124.881.000

Tabel 5.19. Kenaikan/Penurunan Beban Hibah-LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah				
2	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan				
3	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar				
4	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Menengah di Kabupaten/Kota - LO				
5	Beban Hibah Barang yang akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				
6	Beban Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Kabupaten/Kota				
7	Beban uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	130.358.250	124.881.000	5.477.250	4.39
8	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Kabupaten/Kota (Yang Pendanaannya Bersumber Dari Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Dan Dana Otonomi Khusus)				
	Jumlah	130.358.250	124.881.000	5.477.250	4.39

Sumber: LO 2023

Tidak ada selisih pada Belanja Hibah-LRA dan Beban Hibah-LO, yaitu sebesar Rp 130.358.250.

5.2.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2023

Tahun 2022

Rp 10.488.830.127,37

Rp 15.041.648.886,81

Tabel 5.20. Kenaikan/Penurunan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.065.804.282,83	9.654.643.742,82	-4.588.839.460	-47.53
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.558.200.386,30	3.301.615.263,92	256.585.122	7.77
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	876.950.810,54	1.160.159.712,38	283.208.902	-24,41
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	10.891.586,,89	10.233.106,88	658.480	6.43
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
	Jumlah	10.488.830.127,37	15.041.648.886,81	-4.552.818.759	-30.27

Sumber: LO 2023

5.2.2.8. Beban penyusutan Aset Lain-Lain

Tahun 2023

Tahun 2022

Rp 976.983.060,81

Rp 914.997.060,81

Tabel 5.21. Kenaikan/Penurunan Beban Penyusutan Aset Lain-lain-LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain Rusak Berat				
2	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain dalam Penelusuran/Hilang				
3	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain akan D hibahkan	752.076.716,81	752.076.716,81	0	0
4	Beban Penyusutan Aset lain-Lain Lainnya	224.906.344	162.920.344	61.986.000	38.05
	Jumlah	976.983.060,81	914.997.060,81	61.986.000	6.77

Sumber: LO 2023

5.2.3. Surplus/Defisit– LO

Tahun 2023

Tahun 2022

Rp (191.244.418.868)

Rp (307.164.242.102,20)

Berdasarkan hasil Pendapatan - LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 400.401.182,51 dan Beban Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 191.644.820.050,51 Laporan Keuangan mengalami (Surplus/Defisit) sebesar Rp (191.244.418.868)

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.3.1. Ekuitas Awal

Tahun 2023

Tahun 2022

Rp 494.366.703.641,29

Rp 490.898.467.354,45

Ekuitas Awal per 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp 494.366.703.641,29 Ekuitas tersebut diperoleh dari saldo ekuitas per 31 Desember 2022 di Neraca (*Audited*).

5.3.2. Surplus/Defisit – LO

Tahun 2023

Tahun 2022

Rp (191.244.418.868)

Rp (307.164.242.102,20)

Surplus/Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp (191.244.418.868). Surplus/Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional.

5.3.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp 88.844.515,89 merupakan koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang terdiri dari:

Tabel 5.22. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Koreksi atas Kas	Rp.	
Koreksi Atas Penyisihan Piutang	Rp.	
Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	
Koreksi Nilai Investasi	Rp.	
Koreksi Aset Tetap Baru Ditemukan (Hasil Sensus/Inventarisasi)	Rp.	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp.	
Koreksi Aset Tak Berwujud Baru Ditemukan	Rp.	
Koreksi Aset Lainnya	Rp.	
Koreksi atas Pendapatan	Rp.	
Koreksi atas Beban	Rp.	
Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	Rp.	11.582.587.503
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	Rp. (88.844.515,89)	(4.631.142.881,45)
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun Lalu	Rp.	(56.200.000)
Jumlah	Rp. (88.844.515,89)	6.895.244.622

Sumber: LPE 2023

5.4. Neraca

5.4.1. Aset Lancar

Aset adalah merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dengan satuan uang yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

Diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu satu tahun anggaran.

Aset Lancar per 31 Desember 2023 terdiri dari:

Tabel 5.23. Rincian Aset Lancar

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	
Kas di BLUD	Rp. 8.435.333.294,98	8.394.363.678,13
Persediaan	Rp. 1.137.440.704	1.170.123.981
Total Aset Lancar	Rp. 9.572.773.998,98	9.564.487.659,13

Sumber: Neraca 2023

5.4.1.1. Kas di BLUD

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp 8.435.333.294,98	Rp 8.394.363.678,13

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang sumbernya berasal dari operasional BLUD sebesar Rp 8.435.333.294,98 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	Tahun 2023 Rp 8.435.333.294,98	Tahun 2022 Rp 8.394.363.678,13
---	-----------------------------------	-----------------------------------

Tabel 5.24 Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan BLUD

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	8.435.333.294,98	8.394.363.678,13
	Jumlah	8.435.333.294,98	8.394.363.678,13

Sumber: Neraca 2023

5.4.1.2. Persediaan	Tahun 2023 Rp 1.137.440.704	Tahun 2022 Rp 1.170.123.981
---------------------	--------------------------------	--------------------------------

Persediaan sebesar Rp 1.137.440.704 terdiri dari Barang Pakai Habis yang masih tersisa per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.137.440.704.

5.4.1.3. Barang Pakai Habis	Tahun 2023 Rp 1.137.440.704	Tahun 2022 Rp 1.170.123.981
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

1. Bahan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bahan/Bibit Tanaman	208.047.500
2	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	11.500.000
	Jumlah	219.547.500

2. Alat/bahan untuk kegiatan kantor

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	17.133.900
2	Perabot kantor	3.349.500
3	Alat Listrik	41.043.300
4	Perlengkapan Dinas	182.036.900
	Jumlah	243.563.600

3. Obat-obatan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Obat	378.729.604
	Jumlah	378.729.604

4. Persediaan untuk dijual/diserahkan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya	295.600.000
2		
	Jumlah	295.600.000

5.4.2. Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tidak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintahan.

Aset Tidak Lancar terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Aset Tetap	Rp. 448.653.466.403,13	438.953.695.551,35
Aset Lainnya	Rp. 45.150.154.588,40	46.052.137.649,21
Total Aset Tidak Lancar	Rp. 493.803.620.991,53	485.005.833.200,56

5.4.2.1. Aset Tetap	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp 448.653.466.403,13	Rp 438.953.695.551,35

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2023 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5.25. Rincian Aset Tetap

No	Uraian	Saldo Aset Tetap berdasarkan Neraca per 31 Des 2022	Realisasi Belanja Modal TA 2023	Penyesuaian Nilai	Saldo Aset Tetap per 31 Des 2023 setelah penyesuaian
1	Tanah	280.997.151.190,50	-	-	280.997.151.190,50
2	Peralatan dan Mesin	225.508.529.758,90	5.388.531.410	-163.139.520,00	230.733.921.648,90
3	Gedung dan Bangunan	163.490.094.406,74	9.176.586.081,50	4.376.301.176,41	177.042.981.664,65
4	Jalan, Jaringan dan Jembatan	29.487.707.056,12	224.933.750	310.812.200,00	30.023.453.006,12
5	Aset Tetap Lainnya	2.996.081.629,31	75.000.000	-75.000.000,00	2.996.081.629,31
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.537.558.376,41			-
7	Akumulasi Penyusutan	(268.063.426.866,63)			(273.140.122.736,35)
	JUMLAH	438.953.695.551,35	14.865.051.242		448.653.466.403,13

Sumber: Neraca 2023

Rincian aset tetap disajikan sebagai berikut:

5.4.2.1.1. Tanah	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp 280.997.151.190,50	Rp 280.997.151.190,50

Tanah dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Saldo Awal	280.997.151.190,50	280.997.151.190,50
• Penambahan nilai aset tetap Tanah terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2023		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Tanah terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	280.997.151.190,50	280.997.151.190,50

Sumber: Neraca 2023

Tidak ada perubahan pada saldo tanah tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022.

5.4.2.1.2. Peralatan dan Mesin

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp 230.733.921.648,90	Rp 225.508.529.758,90

Peralatan dan Mesin terdiri dari:

1. Alat Besar

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Besar per 31 Desember 2023 dan 2022.	4.733.672.375	4.554.424.025

Alat-alat Berat dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Saldo Awal	4.554.424.025	
• Penambahan nilai aset tetap Alat Besar terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2023	179.248.350	
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Alat Berat terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	4.733.672.375	4.554.424.025

Sumber: Neraca 2023

Perbedaan saldo alat besar pada tahun 2023 hanya berasal dari belanja modal pada tahun 2023.

2. Alat Angkutan

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Angkutan per 31 Desember 2023 dan 2022.	29.054.445.472	29.054.445.472

Alat-alat Angkutan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2019
• Saldo Awal • Penambahan nilai aset tetap Alat Angkutan terdiri dari: - Belanja modal tahun 2023 - Hibah - Reklasifikasi antar Aset Tetap - Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya - Reklasifikasi antar Aset Lainnya - Barang dan Jasa - Mutasi antar SKPA - Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi - Reklasifikasi dari KDP - Penyesuaian nilai akibat revaluasi - Extracomtable - Utang Belanja Modal • Pengurangan aset tetap Alat Angkutan terdiri dari: - Hibah - Reklasifikasi antar Aset Tetap - Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya - Reklasifikasi antar Aset Lainnya - Beban Barang dan Jasa - Reklasifikasi ke Persediaan - Mutasi antar SKPA - Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi - Reklasifikasi ke KDP - Penyesuaian nilai akibat revaluasi - Extracomtable - Penghapusan - Utang Belanja Modal	29.054.445.472	
Saldo akhir setelah penyesuaian	29.054.445.472	29.054.445.472

Sumber: Neraca 2023

Tidak ada perubahan pada saldo alat-alat angkutan tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022.

3. Alat Bengkel dan Alat Ukur

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2023 dan 2022.	4.480.286.763	4.249.316.763

Alat-alat Bengkel dan Ukur dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2019
• Saldo Awal • Penambahan nilai aset tetap Alat Bengkel terdiri dari: - Belanja modal tahun 2023 - Hibah - Reklasifikasi antar Aset Tetap - Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya - Reklasifikasi antar Aset Lainnya - Barang dan Jasa - Mutasi antar SKPA - Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi - Reklasifikasi dari KDP - Penyesuaian nilai akibat revaluasi	4.249.316.763	
	64.709.120	
	170.470.000	

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2019
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Alat Bengkel terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable	(4.209.120)	
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	4.480.286.763	4.249.316.763

Sumber: Neraca 2023

Perbedaan saldo pada alat bengkel dan ukur pada tahun 2023 berasal dari belanja modal tahun 2023 dan reklasifikasi antar aset tetap (alat pertanian dan alat laboratorium) serta extracomptable.

4. Alat Pertanian

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Pertanian per 31 Desember 2023 dan 2022.	141.189.958.105	141.189.958.105

Alat-alat Pertanian dan Peternakan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Saldo Awal	141.189.958.105	
• Penambahan nilai aset tetap Alat Pertanian terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2023	2.102.030.000	
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
• Pengurangan aset tetap Alat Pertanian terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(2.096.060.000)	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable	(5.970.000)	
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
Saldo akhir setelah penyesuaian	141.189.958.105	141.189.958.105

Sumber: Neraca 2023

Meskipun saldo akhir alat pertanian pada tahun 2023 adalah sama namun terdapat penambahan akibat belanja modal serta pengurangan akibat reklasifikasi antar aset tetap (alat bengkel dan alat ukur, alat laboratorium, komputer, alat kantor rumah tangga) serta extracomptable.

5. Alat Kantor dan Rumah Tangga

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2023 dan 2022.	26.905.402.565	25.915.344.025

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Saldo Awal	25.915.344.025	
• Penambahan nilai aset tetap Alat kantor dan Rumah terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2023	780.513.540	
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	209.545.000	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Alat kantor dan Rumah terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	26.905.402.565	25.915.344.025

Sumber: Neraca 2023

Perubahan pada saldo alat kantor dan rumah tangga pada tahun 2023 berasal dari belanja modal pada tahun 2023 dan reklasifikasi antar aset tetap (alat pertanian, alat studio, dan alat laboratorium).

6. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar per 31 Desember 2023 dan 2022.	1.908.230.906	1.772.510.906

Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Saldo Awal	1.772.510.906	
• Penambahan nilai aset tetap Alat Studio dan Komunikasi terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2023	258.685.400	
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
• Pengurangan aset tetap Alat Studio dan Komunikasi terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(119.560.000)	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke-Persediaan		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable	(3.405.400)	
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
Saldo akhir setelah penyesuaian	1.908.230.906	1.772.510.906

Sumber: Neraca 2023

Perbedaan saldo alat studio dan komunikasi pada tahun 2023 berasal dari belanja modal dan reklasifikasi antar aset tetap (alat kantor dan rumah tangga) serta extracomptable.

7. Alat Kedokteran dan Kesehatan

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan per 31 Desember 2023 dan 2022.	136.328.505	136.328.505

Alat-alat Kedokteran dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Saldo Awal	136.328.505	
• Penambahan nilai aset tetap Alat Kedokteran terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2023		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Alat Kedokteran terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	136.328.505	136.328.505

Sumber: Neraca 2023

Tidak ada perubahan pada saldo alat-alat kedokteran tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022

8. Alat Laboratorium

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Laboratorium per 31 Desember 2023 dan 2022.	8.373.772.994	5.785.562.994

Alat-alat Laboratorium dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Saldo Awal	5.785.562.994	
• Penambahan nilai aset tetap Alat Laboratorium terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2023	1.012.280.000	
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	1.765.440.000	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Alat Laboratorium terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(189.510.000)	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	8.373.772.994	5.785.562.994

Sumber: Neraca 2023

Perubahan saldo alat laboratorium pada tahun 2023 berasal dari belanja modal tahun 2023 dan penambahan akibat reklasifikasi antar aset tetap (alat pertanian), serta pengurangan akibat reklasifikasi antar aset tetap (bangunan gedung, alat kantor & rumah tangga, alat bengkel, dan instalasi).

9. Komputer

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Merupakan saldo alat-alat Komputer Petunjuk per 31 Desember 2023 dan 2022.	13.508.625.913,90	12.407.440.913,90

Alat-alat Komputer Petunjuk dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Saldo Awal	12.407.440.913,90	
• Penambahan nilai aset tetap Alat Komputer terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2023	991.065.000	
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	110.120.000	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
• Pengurangan aset tetap Alat Komputer terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
Saldo akhir setelah penyesuaian	13.508.625.913,90	12.407.440.913,90

Sumber: Neraca 2023

Perubahan saldo alat komputer dan petunjuk pada tahun 2023 berasal dari belanja modal tahun 2023 dan reklasifikasi antar aset tetap (alat pertanian).

10. Alat Keselamatan Kerja

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Merupakan Alat Keselamatan Kerja per 31 Desember 2023 dan 2022.	281.148.050	281.148.050

Alat-alat Keselamatan Kerja dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Saldo Awal	281.148.050	
• Penambahan nilai aset tetap Alat Keselamatan Kerja terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2023		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
- Reklasifikasi dari KDP - Penyesuaian nilai akibat revaluasi - Extracomptable - Utang Belanja Modal - Belanja Modal BLUD		
Pengurangan aset tetap Alat Keselamatan Kerja terdiri dari:		
- Hibah - Reklasifikasi antar Aset Tetap - Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya - Reklasifikasi antar Aset Lainnya - Beban Barang dan Jasa - Reklasifikasi ke Persediaan - Mutasi antar SKPA - Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi - Reklasifikasi ke KDP - Penyesuaian nilai akibat revaluasi - Extracomptable - Penghapusan - Utang Belanja Modal - Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	281.148.050	281.148.050

Sumber: Neraca 2023

Tidak ada perubahan pada saldo alat keselamatan kerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022.

5.4.2.1.3. Gedung dan Bangunan

Tahun 2023 Tahun 2022
Rp 177.042.981.664,65 Rp 163.490.094.406,74

Gedung dan Bangunan terdiri dari:

1. Bangunan Gedung

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Merupakan saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2023 dan 2022.	162.643.907.497,99	149.301.398.472,08

Bangunan Gedung dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Saldo Awal	149.301.398.472,08	
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan Gedung terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2023 - Hibah - Reklasifikasi antar Aset Tetap - Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya - Reklasifikasi antar Aset Lainnya - Barang dan Jasa - Mutasi antar SKPA - Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi - Reklasifikasi dari KDP - Penyesuaian nilai akibat revaluasi - Extracomptable - Utang Belanja Modal - Belanja Modal BLUD	9.176.586.081,50 4.685.448.376	
• Pengurangan aset tetap Bangunan Gedung terdiri dari:		
- Hibah - Reklasifikasi antar Aset Tetap - Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya - Reklasifikasi antar Aset Lainnya - Beban Barang dan Jasa	(519.525.432)	

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	162.643.907.497,99	149.301.398.472,08

Sumber: Neraca 2023

Perubahan saldo bangunan gedung pada tahun 2023 berasal dari penambahan akibat belanja modal tahun 2023 dan reklasifikasi antar aset tetap (alat laboratorium dan KDP) serta pengurangan akibat reklasifikasi antar aset tetap (pagar, bangunan air, dan jaringan).

2. Bangunan Monumen

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Merupakan saldo Monumen per 31 Desember 2023 dan 2022.	1.493.092.000	1.493.092.000

Bangunan Monumen dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Saldo Awal	1.493.092.000	
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan Monumen terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2023		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Bangunan Monumen terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	1.493.092.000	1.493.092.000

Sumber: Neraca 2023

Tidak ada perubahan pada saldo bangunan monumen tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022.

3. Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Merupakan saldo Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti per 31 Desember 2023 dan 2022.	12.905.982.166,66	12.695.603.934,66

Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Saldo Awal	12.695.603.934,66	
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan Tugu Titik Kontrol terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2023		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	210.378.232	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Bangunan Tugu Titik Kontrol terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	12.905.982.166,66	12.695.603.934,66

Sumber: Neraca 2023

Perubahan saldo bangunan tugu titik kontrol/pasti pada tahun 2023 berasal dari reklasifikasi antar aset tetap (bangunan gedung).

5.4.2.1.4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp 30.023.453.006,12	Rp 29.487.707.056,12

1. Jalan dan Jembatan

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Merupakan saldo Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2023 dan 2022.	16.797.333.523,66	16.583.199.773,66

Jalan dan Jembatan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Saldo Awal	16.583.199.773,66	
• Penambahan nilai aset tetap Jalan dan Jembatan terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2023	214.133.750	
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Jalan dan Jembatan terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	16.797.333.523,66	16.583.199.773,66

Sumber: Neraca 2023

Perubahan saldo jalan dan jembatan pada tahun 2023 hanya berasal dari belanja modal pada tahun yang bersangkutan.

2. Bangunan Air

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Merupakan saldo Bangunan Air (Irigasi) per 31 Desember 2023 dan 2022.	8.929.764.267,20	8.720.394.967,20

Bangunan Air (Irigasi) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Saldo Awal	8.720.394.967,20	
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan Air terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2023	10.800.000	
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	209.369.300	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Bangunan Air terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(10.800.000)	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	8.929.764.267,20	8.720.394.967,20

Sumber: Neraca 2023

Perubahan saldo bangunan air pada tahun 2023 berasal dari penambahan akibat belanja modal tahun 2023 dan reklasifikasi antar aset tetap (bangunan gedung) serta pengurangan akibat reklasifikasi antar aset tetap (instalasi).

3. Instalasi

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Merupakan saldo Instalasi per 31 Desember 2023 dan 2022.	1.677.137.110	1.664.672.110

Instalasi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Saldo Awal	1.664.672.110	
• Penambahan nilai aset tetap Instalasi terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2023		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	12.465.000	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Instalasi terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	1.677.137.110	1.664.672.110

Sumber: Neraca 2023

Perubahan saldo instalasi pada tahun 2023 berasal dari reklasifikasi antar aset tetap (bangunan air dan alat laboratorium).

4. Jaringan

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Merupakan saldo Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022.	2.619.218.105,26	2.519.440.205,26

Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Saldo Awal	2.519.440.205,26	
• Penambahan nilai aset tetap Jaringan terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2023		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	99.777.900	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Jaringan terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	2.619.218.105,26	2.519.440.205,26

Sumber: Neraca 2023

Perubahan saldo jaringan pada tahun 2023 hanya berasal dari reklasifikasi antar aset tetap (bangunan gedung).

5.4.2.1.5. Aset Tetap Lainnya

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp 2.996.081.629,31	Rp 2.996.081.629,31

Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

1. Bahan Perpustakaan

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Merupakan saldo Bahan Perpustakaan per 31 Desember 2023 dan 2022.	1.520.597.285	1.520.597.285

Buku dan Perpustakaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Saldo Awal	1.520.597.285	
• Penambahan nilai aset tetap Buku dan bahan Perpustakaan terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2023		

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
- Hibah - Reklasifikasi antar Aset Tetap - Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya - Reklasifikasi antar Aset Lainnya - Barang dan Jasa - Mutasi antar SKPA - Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi - Reklasifikasi dari KDP - Penyesuaian nilai akibat revaluasi - Extracomptable - Utang Belanja Modal - Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Buku dan Perpustakaan terdiri dari: - Hibah - Reklasifikasi antar Aset Tetap - Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya - Reklasifikasi antar Aset Lainnya - Beban Barang dan Jasa - Reklasifikasi ke Persediaan - Mutasi antar SKPA - Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi - Reklasifikasi ke KDP - Penyesuaian nilai akibat revaluasi - Extracomptable - Penghapusan - Utang Belanja Modal - Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	1.520.597.285	1.520.597.285

Sumber: Neraca 2023

Tidak ada perubahan pada saldo buku dan bahan perpustakaan tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022.

2. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Merupakan saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga per 31 Desember 2023 dan 2022.	2.000.000	2.000.000

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Saldo Awal	2.000.000	
• Penambahan nilai aset tetap Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan terdiri dari: - Belanja modal tahun 2023 - Hibah - Reklasifikasi antar Aset Tetap - Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya - Reklasifikasi antar Aset Lainnya - Barang dan Jasa - Mutasi antar SKPA - Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi - Reklasifikasi dari KDP - Penyesuaian nilai akibat revaluasi - Extracomptable - Utang Belanja Modal		
• Pengurangan aset tetap Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan terdiri dari: - Hibah - Reklasifikasi antar Aset Tetap - Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya - Reklasifikasi antar Aset Lainnya - Beban Barang dan Jasa - Reklasifikasi ke Persediaan - Mutasi antar SKPA - Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
Saldo akhir setelah penyesuaian	2.000.000	2.000.000

Sumber: Neraca 2023

Tidak ada perubahan pada saldo bahan perpustakaan tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022.

3. Hewan

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Merupakan saldo Hewan per 31 Desember 2023 dan 2022.	928.905.000	928.905.000

Hewan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Saldo Awal	928.905.000	
• Penambahan nilai aset tetap Hewan terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2023		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
• Pengurangan aset tetap Hewan terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
Saldo akhir setelah penyesuaian	928.905.000	928.905.000

Sumber: Neraca 2023

Tidak ada perubahan pada saldo hewan tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022.

4. Aset Tetap Dalam Renovasi

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Merupakan saldo Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2023 dan 2022.	544.579.344,31	544.579.344,31

Aset Tetap Dalam Renovasi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Saldo Awal	544.579.344,31	
• Penambahan nilai aset tetap Aset Tetap Dalam Renovasi terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2023		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
• Pengurangan aset tetap Aset Tetap Dalam Renovasi terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
Saldo akhir setelah penyesuaian	544.579.344,31	544.579.344,31

Sumber: Neraca 2023

Tidak ada perubahan pada saldo aset tetap dalam renovasi tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022.

5.4.2.1.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tahun 2023 Rp 0	Tahun 2022 Rp 4.537.558.376,41
--	--------------------	-----------------------------------

Kontruksi Dalam Pengerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Saldo Awal	4.537.558.376,41	
• Penambahan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan		
• Penyelesaian kontruksi dalam pengerjaan	(4.537.558.376,41)	
Saldo akhir setelah penyesuaian	0	4.537.558.376,41

Sumber: Neraca 2023

Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2023 menjadi nihil karena proses konstruksi sudah selesai sehingga nilainya masuk ke bangunan gedung.

5.4.2.1.7. Akumulasi Penyusutan	Tahun 2023 (Rp 273.140.122.736,35)	Tahun 2022 (Rp 268.063.426.866,63)
---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Akumulasi Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27. Rincian Akumulasi Penyusutan

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
- Peralatan dan Mesin	(217.813.353.237,92)	(212.747.548.955,09)
- Alat Besar	(4.385.255.503,58)	(4.258.861.239,29)
- Alat Angkutan	(23.535.475.215,50)	(22.043.564.659,50)
- Alat Bengkel dan Alat Ukur	(3.878.749.943,30)	(3.557.348.927,20)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
- Alat Pertanian	(140.987.728.672,25)	(140.784.599.239,50)
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	(25.003.875.627)	(23.906.723.771,00)
- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	(1.431.969.043,60)	(1.239.145.262,40)
- Alat Kedokteran dan Kesehatan	(124.323.105)	(112.317.705,00)
- Alat Laboratorium	(5.884.441.506,50)	(5.380.254.447,75)
- Alat Persenjataan	(107.900.000)	(107.900.000,00)
- Komputer	(12.138.336.571,19)	(11.021.535.653,45)
- Alat Keselamatan Kerja	(281.148.050)	(281.148.050,00)
- Alat Peraga	(14.400.000)	(14.400.000,00)
- Rambu-rambu	(39.750.000)	(39.750.000,00)
- Gedung dan Bangunan	(40.191.769.490,11)	(40.191.769.490,11)
- Bangunan Gedung	(37.160.419.667,55)	(37.160.419.667,55)
- Monumen	(240.392.520)	(240.392.520,00)
- Tugu Tanda Batas	(2.790.957.302,56)	(2.790.957.302,56)
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	(15.103.642.207,66)	(15.103.642.207,66)
- Jalan dan Jembatan	(11.761.194.139,25)	(11.761.194.139,25)
- Bangunan Air	(1.826.647.705,45)	(1.826.647.705,45)
- Instalasi	(439.319.314,33)	(439.319.314,33)
- Jaringan	(1.076.481.048,63)	(1.076.481.048,63)
- Aset Tetap Lainnya	(31.357.800,66)	(20.466.213,77)
- Aset Tetap dalam Renovasi	(31.357.800,66)	(20.466.213,77)
Saldo akhir setelah penyesuaian	(273.140.122.736,35)	(268.063.426.866,63)

Sumber: Neraca 2023

Perubahan rincian akumulasi penyusutan aset tetap terjadi pada Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, serta Komputer.

5.4.2.2. Aset Lainnya	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp 45.150.154.588,40	Rp 46.052.137.649,21

Aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp 45.150.154.588,40 terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain sebagai berikut:

5.4.2.2.1. Aset Tak Berwujud	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp 2.688.231.000	Rp 2.613.231.000

Aset Tak Berwujud merupakan nilai dari software sebesar Rp 634.731.000,- ditambah kajian Rp 2.053.500.000,-

5.4.2.2.2. Aset Lain-lain	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp 43.096.654.588,40	Rp 44.073.637.649,21

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksud untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah Aceh direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya. Hal ini disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset tetap yang tidak dapat diukur secara andal juga direklasifikasi sebagai aset lain-lain.

Aset lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 43.096.654.588,40 terdiri dari:

1. Aset Rusak Berat/Usang
Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp 6.545.249.983,- dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.28. Rincian Aset Rusak Berat/Usang

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Alat Besar		
2	Alat Angkutan	1.409.743.582	1.409.743.582
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur		
4	Alat Pertanian	4.612.000.000	4.612.000.000
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	373.806.401	373.806.401
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan		
8	Alat Laboratorium		
9	Komputer		
10	Alat Eksplorasi		
11	Alat Pengeboran		
12	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		
13	Alat Bantu Eksplorasi		
14	Alat Keselamatan Kerja		
15	Alat Peraga		
16	Peralatan Proses/Produksi		
17	Rambu-rambu		
18	Bangunan Gedung	149.700.000	149.700.000
Jumlah		6.545.249.983	6.545.249.983

Sumber: Neraca 2023

2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp 36.551.404.605,40
- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional terdiri dari: Aset Tetap dalam Penelusuran/Hilang sebesar Rp 694.355.050,- Aset Tetap Hibah sebesar Rp 52.618.446.044,- Aset Lain Lain Lainnya Rp 9.120.150.200,-

5.4.2.2.3. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tahun 2023
Rp 634.731.000

Tahun 2022
Rp634.731.000

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan Akumulasi Amortisasi dari Software sebesar Rp 634.731.000,- dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.29. Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Amortisasi s.d Tahun 2023	Nilai Buku Tahun 2023
SOFTWARE						
1	Software	31/12/2005		2.376.000		
2	Software	31/12/2006		564.000.000		
3	Software	31/12/2011		315.000		
4	Software	31/12/2011		315.000		
5	Software	31/12/2011		315.000		
6	Software	31/12/2011		315.000		
7	Software	31/12/2011		575.000		
8	Software	31/12/2011		575.000		
9	Software	31/12/2011		575.000		
10	Software	31/12/2011		575.000		
11	Software	31/12/2011		1.500.000		
12	Software	31/12/2011		1.500.000		
13	Software	31/12/2011		1.500.000		
14	Software	31/12/2011		1.500.000		
15	Software	31/12/2011		3.795.000		
16	Software	31/12/2014		750.000		

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Amortisasi s.d Tahun 2023	Nilai Buku Tahun 2023
17	Software	31/12/2014		750.000		
18	Software	31/12/2014		750.000		
19	Software	31/12/2015		650.000		
20	Software	31/12/2015		650.000		
21	Software	31/12/2015		650.000		
22	Software	31/12/2015		650.000		
23	Software	31/12/2015		650.000		
24	Software	31/12/2016		49.500.000		
	TOTAL SOFTWARE			634.731.000		

Sumber: Rekon Aset

5.4.2.2.4. Aset Ekstracomptable

Tahun 2023
Rp 2.701.928.975

Tahun 2022
Rp 2.688.344.455

Aset Ekstracomptable adalah pengeluaran belanja modal yang tidak memenuhi batasan minimal sebesar Rp 2.701.928.975,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.30. Aset Ekstracomptable

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Alat Besar	10.649.000,00	10.649.000,00
2	Alat Angkutan	44.675.414,00	44.675.414,00
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	50.980.500,00	50.980.500,00
4	Alat Pertanian	387.713.330,00	387.713.330,00
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	6.900.400,00	3.495.000,00
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	5.465.000,00	5.465.000,00
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	100.241.966,00	90.062.846,00
8	Alat Laboratorium	420.000,00	420.000,00
9	Alat Persenjataan	33.444.600,00	33.444.600,00
10	Komputer	-	-
11	Alat Eksplorasi	-	-
12	Alat Pengeboran	-	-
13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	-	-
14	Alat Bantu Eksplorasi	17.145.492,00	17.145.492,00
15	Alat Keselamatan Kerja	-	-
16	Alat Peraga	-	-
17	Peralatan Proses/Produksi	-	-
18	Rambu - Rambu	-	-
19	Peralatan Olah Raga	308.124.978,00	308.124.978,00
20	Bangunan Gedung	-	-
21	Monumen	-	-
22	Bangunan Menara	-	-
23	Tugu Titik Kontrol / Pasti	66.685.000,00	66.685.000,00
24	Jalan dan Jembatan	1.600.233.295,00	1.600.233.295,00
25	Bangunan Air/Irigasi	-	-
26	Instalasi	69.250.000,00	69.250.000,00
27	Jaringan	10.649.000,00	10.649.000,00
Jumlah		2.701.928.975	2.688.344.455

Sumber: Rekon Aset

Perbedaan saldo aset extracomptable pada tahun 2023 berasal dari penambahan

5.4.3. Kewajiban

Tahun 2023
Rp 164.174.197,88

Tahun 2022
Rp 203.617.218,40

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban Pemerintah Aceh dapat timbul dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, dan kewajiban Pemerintah Aceh yang timbul dari keharusan membayar kembali pinjaman.

Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp 164.174.197,88 Terdiri dari:

1. Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 152.425.564,-

Utang Belanja Jasa sebesar Rp 152.425.564,- terdiri dari Utang Air Rp 1.769.930,- Utang Listrik Rp 127.155.634,- Utang Internet Rp 23.500.000,-

5.4.4. Ekuitas

Tahun 2023
Rp 498.688.225.079,90

Tahun 2022
Rp 494.366.703.641,29

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan.

Saldo ekuitas pada neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas jumlah ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 498.688.225.079,90

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh beralamat di Jalan Panglima Nyak Makam No. 24 Lampineung, Kota Banda Aceh. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan Sekretaris yang menangani masalah internal Dinas serta beberapa orang Kepala Bidang Teknis serta kelompok jabatan fungsional.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terdiri dari (1) Bidang Tanaman Pangan; (2) Bidang Hortikultura; (3) Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan; (4) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan; (5) Bidang Sarana dan Prasarana; (6) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan; serta dibantu oleh beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu: (1) UPTD Balai Proteksi TPH; (2) UPTD Bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH; (3) UPTD Balai Benih Hortikultura; (4) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan; (5) UPTD Mekanisasi Pertanian; (6) UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan; (7) UPTD Balai Benih dan Peralatan Mesin Perkebunan.

Visi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh adalah: **"Aceh Sebagai Sebagai Basis Pertanian Dan Perkebunan Menuju Masyarakat Tani Sejahtera Yang Tangguh Berkelanjutan Mandiri Dan Berdaya Saing.** Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah
2. Meningkatkan Kemitraan Usaha tani Antara Swasta dan Petani
3. Meningkatkan Produksi, Produktivitas, Investasi, Mutu Hasil Dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian dan Perkebunan
4. Membangun Database Yang Akurat, Perencanaan Berbasis Kinerja Serta Monitoring Dan Pelaporan Yang Akuntabel Yang Didukung Oleh Sistem Jaringan Kerja Dan Informasi Teknologi Yang Tepat Guna

Adapun tugas pokok Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanian dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, maka Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
2. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
3. Penyusunan program penyuluhan pengembangan sumber daya tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
4. Penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
5. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
6. Pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
7. Pembinaan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

8. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
9. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
10. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
11. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
12. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
13. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
14. Pembinaan UPTD;
15. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanian dan perkebunan.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, maka Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh memiliki fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. penyusunan program Pengembangan Sumber Daya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- f. pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. pembinaan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. pengendalian dan penanggulangan bencana alam
- j. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- l. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- m. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

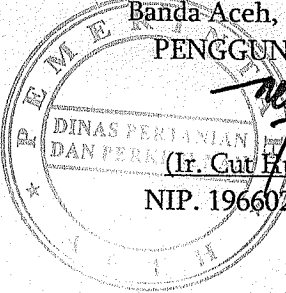
BAB VII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2023 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tersebut telah dikonversi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, pengungkapan, pengakuan, pengukuran dan penjelasan atas akun-akun yang terdapat dalam Laporan Keuangan telah dilakukan secara memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai bahan pemeriksaan bagi pihak Badan Pemeriksa Keuangan, evaluasi bagi Pemerintah Aceh, dan bagi DPRA sebagai bahan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2023 atas pengelolaan keuangan daerah.

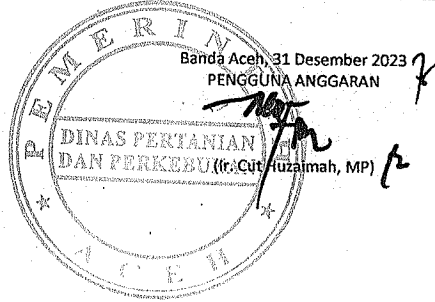
Banda Aceh, 31 Desember 2023
PENGGUNA ANGGARAN

DINAS PERANTARAN
DAN PERK (Ir. Cut Ruzaimah, MP)
NIP. 19660217 199203 2 003


SKPA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
TAHUN ANGGARAN 2023

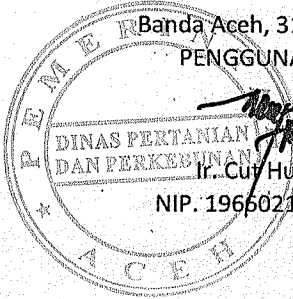
NO	KODE KEGIATAN	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
2	1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	65.650.330,00	65.580.260,00	99,89
3	1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	48.500.000,00	43.500.000,00	89,69
4	1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	419.775.000,00	419.690.000,00	99,98
5	1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-	-
6	1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	21.252.000,00	21.037.800,00	98,99
7	1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	105.513.000,00	105.306.000,00	99,80
8	1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	15.120.000,00	15.120.000,00	100,00
9	1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	255.000.000,00	255.000.000,00	100,00
10	1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	18.529.041.171,00	18.178.493.050,00	98,11
11	1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	385.200.000,00	385.200.000,00	100,00
12	1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.537.890.000,00	1.332.857.476,00	86,67
13	1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	172.120.000,00	171.687.000,00	99,75
14	1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	29.450.000,00	26.650.000,00	90,49
15	1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	32.500.000,00	31.750.000,00	97,69
16	1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	115.900.000,00	90.100.000,00	77,74
17	1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	63.200.000,00	56.900.000,00	90,03
18	1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
19	1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	16.582.867,00	15.386.350,00	92,78
20	1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.730.505.000,00	3.668.576.550,00	98,34
21	1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	237.340.000,00	237.000.000,00	99,86
22	1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00
23	1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	221.760.000,00	214.940.000,00	96,92
24	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
25	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	68.000.000,00	60.500.000,00	88,97
26	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	243.000.000,00	243.000.000,00	100,00
27	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	58.080.000,00	57.800.000,00	99,52
28	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	79.680.000,00	79.680.000,00	100,00
29	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	93.500.000,00	85.800.000,00	91,76
30	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	760.000.000,00	719.815.000,00	94,71
31	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	13.917.527,00	9.217.900,00	66,23
32	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.275.000,00	1.275.000,00	100,00
33	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
34	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	6.943.100,00	6.837.600,00	98,48
35	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	900.000,00	900.000,00	100,00
36	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	689.082.000,00	475.111.260,00	68,95
37	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	14.700.000,00	14.700.000,00	100,00
38	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	22.100.000,00	21.100.000,00	95,48
39	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	514.500.000,00	512.375.166,00	99,59
40	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	900.000,00	900.000,00	100,00
41	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	6.813.680,00	6.680.000,00	98,04
42	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	561.508.476,00	434.000.000,00	77,29
43	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.870.000,00	1.870.000,00	100,00
44	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	12.464.738,00	12.447.600,00	99,86
45	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	74.400.000,00	-	-
46	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	32.000.000,00	31.741.560,00	99,19
47	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	143.175.600,00	133.320.000,00	93,12
48	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	2.359.403,00	2.335.500,00	98,99
49	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.094.400.000,00	1.094.200.000,00	99,98
50	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	5.928.000,00	5.928.000,00	100,00
51	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.494.704,00	1.490.000,00	99,69
52	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	2.259.128,00	2.208.600,00	97,76
53	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	4.312.024,00	4.209.120,00	97,61
54	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	4.756.500.000,00	4.664.842.012,00	98,07
55	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	137.156.400,00	135.200.000,00	98,57
56	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	322.920,00	320.000,00	99,10
57	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	120.000.000,00	119.560.000,00	99,63
58	1.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.297.100,00	1.292.000,00	99,61
59	1.02.02.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
60	1.02.02.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	149.994.000,00	140.629.020,00	93,76
61	1.02.02.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	31.875.000,00	31.875.000,00	100,00
62	1.02.02.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	28.000.000,00	26.800.000,00	95,71
63	1.02.02.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	38.715.000,00	38.715.000,00	100,00
64	1.02.02.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	7.929.950,00	7.929.950,00	100,00
65	1.02.02.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	38.500.000,00	38.500.000,00	100,00
66	1.02.02.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	2.142.848,00	2.142.848,00	100,00
67	1.02.02.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
68	1.02.02.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00
69	1.02.02.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	121.200.000,00	121.200.000,00	100,00
70	1.02.02.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	5.643.202,00	5.642.950,00	100,00
71	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	16.650.000,00	16.000.000,00	96,10
72	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	23.180.000,00	23.180.000,00	100,00
73	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	1.247.904.000,00	1.243.278.463,00	99,63
74	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	18.168.000,00	17.890.000,00	98,47
75	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	15.540.000,00	15.540.000,00	100,00
76	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00
77	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	48.000.000,00	47.904.000,00	99,80
78	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	10.089.900,00	9.657.000,00	95,71
79	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	4.009.555,00	3.975.000,00	99,14
80	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	205.200.000,00	204.160.000,00	99,49
81	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	6.996.000,00	6.988.000,00	99,89
82	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-	-	-
83	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	372.906,00	360.000,00	96,54

1	2	3	4	5	6=4/5*100
84	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	49.442.175,00	49.442.175,00	100,00
85	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	8.880.000,00	8.880.000,00	100,00
86	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	166.500.000,00	166.450.000,00	99,97
87	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	5.550.000,00	5.550.000,00	100,00
88	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	26.640.000,00	26.640.000,00	100,00
89	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	35.706.350,00	34.507.000,00	96,64
90	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	18.250.000,00	16.900.000,00	92,60
91	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	73.726.200,00	73.260.000,00	99,37
92	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	22.200.000,00	22.200.000,00	100,00
93	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	56.462.000,00	55.823.750,00	98,87
94	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	106.240.000,00	106.240.000,00	100,00
95	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	8.658.000,00	8.658.000,00	100,00
96	1.03.01.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	63.825.000,00	60.950.000,00	95,50
		TOTAL	38.466.129.254,00	37.190.098.960,00	
		TOTAL BELANJA DAERAH (APBA)	212.313.160.979,00	196.013.580.655,96	
		RASIO TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH (%)	18,12	18,97	



SKPA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING TA 2023

NO 1.	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH (Rp)		%
	BELANJA PADA SKPA		ANGGARAN P-APBA (Rp)	REALISASI (Rp)	
	3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
	1.02.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			
	02.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura			
	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.650.867.500,00	19.650.867.500,00	100,00
	3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
	1.02.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			
	02.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura			
	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.388.859.700,00	3.388.843.500,00	100,00
	3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
	1.02.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			
	03.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan			
	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	110.750.000,00	110.750.000,00	100,00
	3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
	1.03.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi			
	04.	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme			
	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	55.110.176,00	55.110.176,00	100,00

Banda Aceh, 31 Desember 2023
PENGUNA ANGGARAN 

Ir. Cut Huzaimah, MP 
NIP. 19660217 199203 2 003



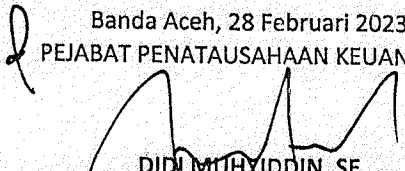
PEMERINTAH ACEH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Jln. T. Panglima Nyak Makam No. 24, Telp, (0651) 7552041 Fax (0651) 7555324
BANDA ACEH 23125

REKONSILIASI KAS DAN BANK
PER TANGGAL 28 FEBRUARI 2023

a. Saldo Buku Per 28 Februari 2023			
1 Saldo Awal		-	
2 Penerimaan		5.242.259.012,00	
3 Pengeluaran		<u>3.242.259.012,00</u>	
Saldo BKU			2.000.000.000,00
b. Saldo Kas dan Bank Per 28 Februari 2023			
1 Kas Bank	2.000.000.000,00		
2 Kas Tunai	<u>-</u>		
Saldo Kas dan Bank		<u>2.000.000.000,00</u>	
c. Koreksi Saldo kas dan Bank			
Jumlah Koreksi		<u>-</u>	
Saldo Kas bank setelah Koreksi			<u>2.000.000.000,00</u>
Selisih Saldo BKU dan Bank			-

Banda Aceh, 28 Februari 2023
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN


DIDI MUHYIDDIN, SE

NIP. 19720222 200801 1 001



PEMERINTAH ACEH DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Jln. T. Panglima Nyak Makam No. 24, Telp, (0651) 7552041 Fax (0651) 7555324
BANDA ACEH 23125

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas
Bendahara Pengeluaran
Tanggal Penutupan Kas yang lalu

: 28 Februari 2023
: Rosda Arwinskyah, SE
: 31 Januari 2023

Saldo Awal Tanggal 01 Februari 2023

Jumlah Penerimaan tanggal 01 Februari 2023 s.d 28 Februari 2023

Jumlah Pengeluaran tanggal 01 Februari 2023 s.d 28 Februari 2023

Saldo Buku

Rp. -
Rp. 5.242.259.012,00
Rp. 3.242.259.012,00
Rp. 2.000.000.000,00

Kas terdiri dari :

1. Uang Kertas

Lembar Uang Kertas Rp.	100.000	lembar	Rp.	-
Lembar Uang Kertas Rp.	50.000	lembar	Rp.	-
Lembar Uang Kertas Rp.	20.000	lembar	Rp.	-
Lembar Uang Kertas Rp.	10.000	lembar	Rp.	-
Lembar Uang Kertas Rp.	5.000	lembar	Rp.	-
Lembar Uang Kertas Rp.	2.000	lembar	Rp.	-
Lembar Uang Kertas Rp.	1.000	lembar	Rp.	-

Uang Logam

Keping Uang Logam Rp.	1.000	Keping	Rp.	-
Keping Uang Logam Rp.	500	Keping	Rp.	-
Keping Uang Logam Rp.	200	Keping	Rp.	-
Keping Uang Logam Rp.	100	Keping	Rp.	-
Keping Uang Logam Rp.	50	Keping	Rp.	-

Jumlah Uang Kas Rp. -

2. Saldo Bank

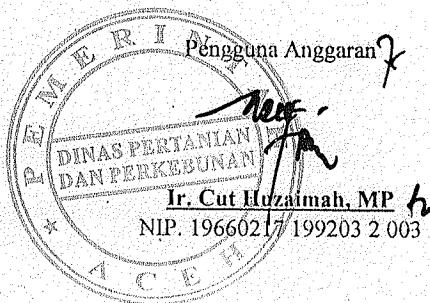
Rp. 2.000.000.000

Jumlah Kas
Perbedaan Positif/ Negatif

Rp. 2.000.000.000,00
Rp. -

Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif :

Banda Aceh, 28 Februari 2023
Bendahara Pengeluaran



Rosda Arwinskyah, SE
NIP. 19661208 200701 1 003

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

DAFTAR PIUTANG*

Tahun Anggaran 2023

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
NIHIL						
Jumlah						

Catatan :

*) Diisi oleh SKPA yang memiliki Piutang dan isi NIHIL bagi SKPA yang tidak memiliki Piutang

Banda Aceh, 31 Desember 2023

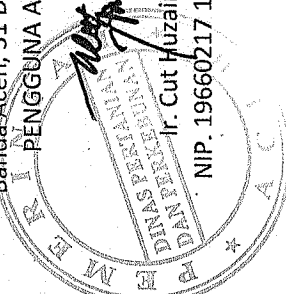
PENGUNA ANGGARAN 7



DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

Ir. Cut Huzaimah, MP

NIP. 19660217 199203 2 003



Daftar Rekapitulasi Jasa Konsultansi dan Kontrak Pekerjaan

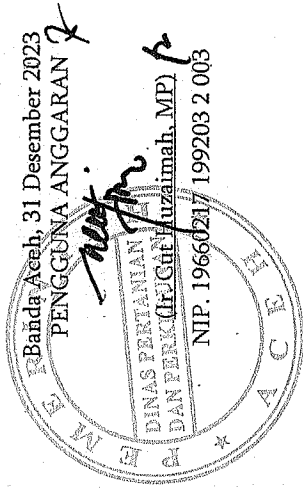
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

Tahun Anggaran 2023

Januari s.d Desember 2023

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana/ Penyedia	Nomor Kontrak										Addendum		Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan		Sumber Dana	Nomor SP2D
			Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Jangka Waktu Pekerjaan (Hari)	Nilai Kontrak			Nomor dan Tanggal SPMK	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal					
						Nilai Kontrak (Rp)	Komposisi BLP (Biaya Langsung Personel) (Rp)	Komposisi BNLP (Biaya Langsung Non Personel) (Rp)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			

NIHIL



PEMERINTAH ACEH
LAPORAN KEGIATAN DEBT SWAP RDI-352/1999 YANG DIALOKASIKAN MELALUI APBA 2023

SKPA :

(Dalam Rupiah)							
NO	DINAS	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH		SISA ANGGARAN	LOKASI	KETERANGAN
			ANGGARAN DPA-SKPA	REALISASI			
NIHIL							

Catatan :

*) Diisi oleh SKPA yang Mempunyai Kegiatan Debt Swap dan Isi NIHIL bagi SKPA yang tidak Mempunyai Kegiatan Debt Swap

Banda Aceh, 31 Desember 2023
PENGUNA ANGGARAN
DINAS PERTANIAN
DAN PERUMAHAN
DAN PERUMAHAN
ACEH
NIP. 19660217 199203 2 003

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2023

NO	URAIAN	SALDO AWAL 2022	MUTASI		SALDO AKHIR 2023
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Diterima Dimuka	11.726.027,40	11.748.633,88	11.726.027,40	11.748.633,88
	Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III	11.726.027,40	11.748.633,88	11.726.027,40	11.748.633,88
2	Utang Belanja	191.891.191,00	152.425.564,00	191.891.191,00	152.425.564,00
	Utang Belanja Jasa	191.891.191,00	152.425.564,00	191.891.191,00	152.425.564,00
	TOTAL				

Banda Aceh, 31 Desember 2023

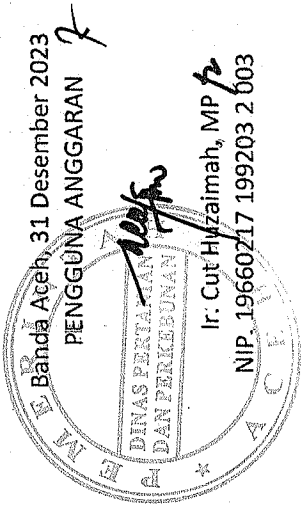
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
NIP. 19660217 199203 2 003

Ir. Cut Huzaimah, MP
NIP. 19660217 199203 2 003

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
DAFTAR PIUTANG*
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=4-5-6
NIHIL						
Jumlah						

Catatan :
*) Diisi oleh SKPA yang memiliki Piutang dan isi NIHIL bagi SKPA yang tidak memiliki Piutang



PROGRESS : REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN TAHUN 2023
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAHAN ACEH
TRIWULAN IV POSISI s/d 29 Desember 2023

NO	KODE	NOMENKLATUR MENU KEGIATAN	Vol/Sat	Pagu Anggaran Sesuai PMK (Rp.)	(5%) Dana Penunjang dari Usulan Pagu Alokasi	TOTAL DAK	Metode Pengadaan Barang dan Jasa	Bobot	Realisasi				SISA ANGGARAN			SP2 D			DAFTAR KONTRAK			Ket.
									Fisik		Keuangan		Rp.	(%)	Nomor/Tgl.	Jumlah	Nama Perusahaan	Nilai Kontrak (Rp.)	Nomor Kontrak			
									(%)	TTB	(Rp.)	(%)										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.09		DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAHAN ACEH		15.685.987.000	527.450.000	16.213.437.000		100,00	74,49	74,49	11.152.725.680	68,79	1.477.020.606	9,11		11.152.725.680		11.151.094.032				
09.02		Pertanian - Tematik: Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani)		15.685.987.000	527.450.000	16.213.437.000		100,00	74,49	74,49	11.152.725.680	68,79	1.477.020.606	9,11		11.152.725.680		11.191.094.032				
A. 09.02.09		Pembangunan/Renovasi UPTD/ Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB-TH) dan Sarana Pendukungnya		8.469.167.200	51.250.000	8.520.437.200		52,55	54,84	28,82	3.998.999.601	46,93	1.189.684.113	13,96		3.998.999.601		3.998.999.601				
09.02.09.1		Ruang Penilaian Varietas Pembangunan/Renovasi :		209.000.000	10.450.000	219.450.000		1,35	100,00	1,35	218.658.066	99,64	791.934	0,36		218.658.066		218.658.066				
		Renovasi Ruang Display Varietas	1 pkt	93.500.000	-	93.500.000	PL	0,58	100,00	0,6	93.226.000	99,71	274.000	0,29	Tgl. 30/08/2023	93.226.000	CV. GOLDEN JAYA	93.226.000	Tgl. 10 Juli 2023			
		- Perencanaan	1 pkt		2.805.000	2.805.000	PL	0,02	100,00	0,0	2.805.000	100	-	-	0006213/15/2023 Tgl. 13/04/2023	2.805.000	CV. ALPIN PATIRAYA CONSULTANT	2.805.000	050/3421/2023 Tgl. 27 Maret 2023			
		- Pengawasan	1 pkt		1.870.000	1.870.000	PL	0,01	100,00	0,0	1.811.033	96,85	58.967	3,15	0023838/15/2023 Tgl. 15/09/2023	1.811.033	CV. PATI UTAMA KONSULTAN	1.811.033	700/9211/2023 Tgl. 13 Juli 2023			
		Renovasi Ruang Penyimpanan Benih penilaian varietas	1 pkt	115.500.000	-	115.500.000	PL	0,71	100,00	0,7	115.154.000	99,70	346.000	0,30	0023844/15/2023 Tgl. 15/09/2023	115.154.000	PT. TUAH PERSADA PERKASA	115.154.000	Tgl. 10 Juli 2023			
		- Perencanaan	1 pkt		3.465.000	3.465.000	PL	0,02	100,00	0,0	3.411.000	98,44	54.000	1,56	0006213/15/2023 Tgl. 13/04/2023	3.411.000	CV. ALPIN PATIRAYA CONSULTANT	3.411.000	050/3421/2023 Tgl. 27 Maret 2023			
		- Pengawasan	1 pkt		2.310.000	2.310.000	PL	0,01	100,00	0,0	2.251.033	97,45	58.967	2,55	0023838/15/2023 Tgl. 15/09/2023	2.251.033	CV. PATI UTAMA KONSULTAN	2.251.033	700/9211/2023 Tgl. 13 Juli 2023			
09.02.09.2		Ruang Sertifikasi Benih Pembangunan/Renovasi :		291.500.000	15.785.000	307.285.000		1,90	61,66	1,17	188.694.200	61,41	780.800			188.694.200		188.694.200				
		Renovasi Ruang Pelayanan pemeriksaan dan pengajuan sertifikasi benih	1 pkt	88.000.000	-	88.000.000	PL	0,54	100,00	0,5	87.575.000	99,52	425.000	0,48	Tgl. 31/08/2023	87.575.000	CV. GOLDEN JAYA	87.575.000	Tgl. 10 Juli 2023			
		- Perencanaan	1 pkt		3.366.000	3.366.000	PL	0,02	100,00	0,0	3.336.000	99,11	30.000	0,89	0006215/15/2023 Tgl. 13/04/2023	3.336.000	CV. ALPIN PATIRAYA CONSULTANT	3.336.000	050/3423/2023 Tgl. 27 Maret 2023			
		- Pengawasan	1 pkt		2.244.000	2.244.000	PL	0,01	100,00	0,0	2.217.800	98,83	26.200	1,17	Tgl. 15/09/2023	2.217.800	CV. PATI UTAMA KONSULTAN	2.217.800	700/9285/2023 Tgl. 13 Juli 2023			
		Renovasi Ruang Penyimpanan Benih	1 pkt	115.500.000	-	115.500.000	PL	0,71	0,00	-	0,00								tdk dilaksanakan			
		- Perencanaan	1 pkt		3.465.000	3.465.000	PL	0,02	100,00	0,0	3.435.000	99,13	30.000	0,87	0006215/15/2023 Tgl. 13/04/2023	3.435.000	CV. ALPIN PATIRAYA CONSULTANT	3.435.000	050/3423/2023 Tgl. 27 Maret 2023			
		- Pengawasan	1 pkt		2.310.000	2.310.000	PL	0,01	0,00	-	0,00								tdk dilaksanakan			
		Renovasi Ruang Sertifikasi Benih	1 pkt	88.000.000	-	88.000.000	PL	0,54	100,00	0,5	87.777.000	99,75	223.000	0,25	0020760/15/2023 Tgl. 23/08/2023	87.777.000	CV. PUTRA GRAHA PERSADA	87.777.000	011/8874/2023 Tgl. 10 Juli 2023			

NO	KODE	NOMENKLATUR MENU KEGIATAN	Vol/Sat	Pagu Anggaran Sesuai PMK (Rp.)	(5%) Dana Penunjang dari Usulan Pagu Alokasi	TOTAL DAK	Metode Pengadaan Barang dan Jasa	Bobot	Realisasi				SISA ANGGARAN		SP2 D			DAFTAR KONTRAK			Ket.
									Fisik		Keuangan		Rp.	(%)	Nomor/Tgl.	Jumlah	Nama Perusahaan	Nilai Kontrak (Rp.)	Nomor Kontrak		
									(%)	TTB	(Rp.)	(%)									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		- Perencanaan	1 pkt		2.640.000	2.640.000	PL	0,02	100,00	0,0	2.619.600	99,23	20.400	0,77	0006215/LS/2023 Tgl. 13/04/2023	2.619.600	CV. ALPIN PATIRAYA CONSULTANT	2.619.600	050/3423/2023 Tgl. 27 Maret 2023		
		- Pengawasan	1 pkt		1.760.000	1.760.000	PL	0,01	100,00	0,0	1.733.800	98,51	26.200	1,49	0023838/LS/2023 Tgl. 15/09/2023	1.733.800	CV. PATI UTAMA KONSULTAN	1.733.800	700/9285/2023 Tgl. 13 Juli 2023		
		Ruang Penyimpanan Sampel Pembanguan/Renovasi :		562.900.000	15.015.000	577.915.000		3,36	100,00	3,56	573.998.650	99,32	3.916.350			573.998.650		573.998.650			
		Renovasi Ruang Asip Benih Laboratorium Penguji	1 pkt	100.100.000	-	100.100.000	PL	0,62	100,00	0,6	99.834.000	99,73	266.000	0,27	0021004/LS/2023 Tgl. 25/08/2023	99.834.000	CV. WASILAH HUTAMA KARYA	99.834.000	011/8886/2023 Tgl. 10 Juli 2023		
		- Perencanaan	1 pkt		3.003.000	3.003.000	PL	0,02	100,00	0,0	2.985.000	99,40	18.000	0,60	0006211/LS/2023 Tgl. 13/04/2023	2.985.000	CV. ALPIN PATIRAYA CONSULTANT	2.985.000	050/3425/2023 Tgl. 27 Maret 2023		
		- Pengawasan	1 pkt		2.002.000	2.002.000	PL	0,01	100,00	0,0	1.975.798	98,69	26.202	1,31	0023838/LS/2023 Tgl. 15/09/2023	1.975.798	CV. PATI UTAMA KONSULTAN	1.975.798	700/9213/2023 Tgl. 13 Juli 2023		
		Renovasi Ruang Kesehatan Benih Laboratorium Penguji	1 pkt	100.100.000	-	100.100.000	PL	0,62	100,00	0,6	99.532.000	99,43	568.000	0,57	0021002/LS/2023 Tgl. 25/08/2023	99.532.000	CV. TOPI JERAMI	99.532.000	011/8883/2023 Tgl. 10 Juli 2023		
		- Perencanaan	1 pkt		3.003.000	3.003.000	PL	0,02	100,00	0,0	2.994.000	99,70	9.000	0,30	0006211/LS/2023 Tgl. 13/04/2023	2.994.000	CV. ALPIN PATIRAYA CONSULTANT	2.994.000	050/3425/2023 Tgl. 27 Maret 2023		
		- Pengawasan	1 pkt		2.002.000	2.002.000	PL	0,01	100,00	0,0	1.975.801	98,69	26.199	1,31	0023838/LS/2023 Tgl. 15/09/2023	1.975.801	CV. PATI UTAMA KONSULTAN	1.975.801	700/9213/2023 Tgl. 13 Juli 2023		
		Renovasi Ruang Penyimpanan Benih Laboratorium Penguji	1 pkt	100.100.000	-	100.100.000	PL	0,62	100,00	0,6	99.742.000	99,64	358.000	0,36	0021246/LS/2023 Tgl. 29/08/2023	99.742.000	CV. ROYAL TEKNINDO	99.742.000	011/8877/2023 Tgl. 10 Juli 2023		
		- Perencanaan	1 pkt		3.003.000	3.003.000	PL	0,02	100,00	0,0	2.984.250	99,38	18.750	0,62	0006211/LS/2023 Tgl. 13/04/2023	2.984.250	CV. ALPIN PATIRAYA CONSULTANT	2.984.250	050/3425/2023 Tgl. 27 Maret 2023		
		- Pengawasan	1 pkt		2.002.000	2.002.000	PL	0,01	100,00	0,0	1.975.801	98,69	26.199	1,31	0023838/LS/2023 Tgl. 15/09/2023	1.975.801	CV. PATI UTAMA KONSULTAN	1.975.801	700/9213/2023 Tgl. 13 Juli 2023		
		Germinator Suhu Berganti Benih Laboratorium Penguji	1 Unit	262.600.000	-	262.600.000	PSE	1,62	100,00	1,6	260.000.000	99,01	2.600.000	0,99	0010031/LS/2023 Tgl. 31/05/2023	260.000.000	CV. MEGAH PERSADA NUSANTARA	260.000.000	027/4581/2023 Tgl. 14 April 2023		
		Penyediaan Sarana Pengaliran Pembanguan/Renovasi :		200.000.000	10.000.000	210.000.000		1,30	100,00	1,30	209.390.335	99,71	609.665			209.390.335		209.390.335			
		Pembangunan Sumc. Bor, Tower, Instalasi Air UPTD BPSBTPH	1 pkt	200.000.000	-	200.000.000	PL	1,23	100,00	1,2	199.644.000	99,82	356.000	0,18	0022727/LS/2023 Tgl. 07/09/2023	199.644.000	CV. WAYAJIBU PERKASA	199.644.000	641/8871/2023 Tgl. 10 Juli 2023		
		- Perencanaan Pembangunan Sumur Bor, Tower, Instalasi Air UPTD BPSBTPH	1 pkt		6.000.000	6.000.000	PL	0,04	100,00	0,0	5.805.300	96,76	194.700	3,25	0009087/LS/2023 Tgl. 19/05/2023	5.805.300	CV. WAHANA UTAMA CONSULTANT	5.805.300	050/5226/2023 Tgl. 02 Mei 2023		
		- Pengawasan Pembangunan Sumur Bor, Tower, Instalasi Air UPTD BPSBTPH	1 pkt		4.000.000	4.000.000	PL	0,02	100,00	0,0	3.941.035	98,53	58.965	1,47	0023838/LS/2023 Tgl. 15/09/2023	3.941.035	CV. PATI UTAMA KONSULTAN	3.941.035	700/9211/2023 Tgl. 13 Juli 2023		
		Penyediaan Peralatan Laboratorium Alat-alat Laboratoru Penguji :		7.205.767.200	-	7.205.767.200		44,44	48,24	21,44	2.808.258.350	38,97	1.183.585.364			2.808.258.350		2.808.258.350			
		Grain Moisture Meter	22 Pkt	311.080.000	-	311.080.000	PSE	1,92	100,00	1,9	60.750.000	65,10	108.580.000	34,9	0010115/LS/2023 Tgl. 31/05/2023	60.750.000	CV. CAHYA BINTANG ENERGI	202.500.000	027/6282/2023 Tgl. 22 Mei 2023	UMK 30%	
		Neraca Analitik Elektrik Digital	4 unit	244.723.000	-	244.723.000	PSE	1,51	100,00	1,5	55.275.000	75,29	60.473.000	24,71	0010115/LS/2023 Tgl. 31/05/2023	55.275.000	CV. CAHYA BINTANG ENERGI	184.250.000	027/5961/2023 Tgl. 15 Mei 2023	UMK 30%	

No	Kode	NOMENKLATUR MENU KEGIATAN	Vol/Sat	Pagu Anggaran Sesuai PMK (Rp.)	(5%) Dana Penunjang dari Usulan Pagu Alokasi	TOTAL DAK	Metode Pengadaan Barang dan Jasa	Bobot	Realisasi				SISA ANGGARAN			SP 2 D			DAFTAR KONTRAK			Ket.
									Fisik		Keuangan		Rp.	%	Nomor/Tgl.	Jumlah	Nama Perusahaan	Nilai Kontrak (Rp.)	Nomor Kontrak			
									(%)	TTB	(Rp.)	(%)										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
											128.975.000				0021005/LS/2023 Tgl. 25/08/2023	128.975.000				20	100%	
		Oven Lab. SH-DO-90FH	2 unit	525.200.000	-	525.200.000	PSE	3,24	100,00	3,2	262.000.000	49,89	263.200.000	50,1	0020762/LS/2023 Tgl. 23/08/2023	262.000.000	PT. MOHSEN PELITA NUSANTARA	262.000.000	027/9281/2023 Tgl. 14 Juli 2023			
		Pengatur Suhu Trimer Ruangan	8 unit	21.169.600	-	21.169.600	PL	0,13	0,00	-	0,00									Tdk dilaksanakan		
		Stick Seed Trier	40 unit	88.880.000	-	88.880.000	PSE	0,55	100,00	0,5	22.803.000	85,52	12.870.000	14,5	0010115/LS/2023 Tgl. 31/05/2023	22.803.000	CV. CAHAYA BINTANG ENERGI	76.010.000	027/6282/2023 Tgl. 22 Mei 2023		UMK 30%	
											53.207.000				0015365/LS/2023 Tgl. 13/05/2023	53.207.000				100%		
		Packing Sealer	22 unit	14.443.000	-	14.443.000	PSE	0,09	100,00	0,1	3.834.000	88,49	1.663.000	11,51	0010117/LS/2023 Tgl. 31 Mei 2023	3.834.000	CV. CAHAYA BINTANG ENERGI	12.780.000	027/5963/2023 Tgl. 15 Mei 2023		UMK 30%	
											8.946.000				0024684/LS/2023 Tgl. 26/09/2023	8.946.000				100%		
		Grinding Mill	2 Pkt	323.200.000	-	323.200.000	PSE	1,99	100,00	2,0	91.650.000	94,52	17.700.000	5,48	0010117/LS/2023 Tgl. 31 Mei 2023	91.650.000	CV. CAHAYA BINTANG ENERGI	305.500.000	027/5963/2023 Tgl. 15 Mei 2023		UMK 30%	
											213.850.000				0024684/LS/2023 Tgl. 26/09/2023	213.850.000				100%		
		Germinator elektrik	2 Pkt	262.600.000	-	262.600.000	PSE	1,62	100,00	1,6	219.200.000	83,47	43.400.000	16,53	0020744/LS/2023 Tgl. 23 Agustus 2023	219.200.000	CV. MEGAH PERSADA NUSANTARA	219.200.000	027/9201/2023 Tgl. 13 Juli 2023			
		AC (Penyediaan Peralatan Laboratorium)	25 unit	250.000.000	-	250.000.000	PSE	1,54	100,00	1,5	237.500.000	95,00	12.500.000	5,00	0003911/LS/2023 Tgl. 31 Maret 2023	237.500.000	CV. SONY ELECTRONIC	237.500.000	027/2023/2023 Tgl. 27 Februari 2023			
		Kulkas (Penyediaan Peralatan Laboratorium)	2 unit	31.800.000	-	31.800.000	PSE	0,20	100,00	0,2	29.000.000	91,19	2.800.000	8,81	0003911/LS/2023 Tgl. 31 Maret 2023	29.000.000	CV. SONY ELECTRONIC	29.000.000	027/2023/2023 Tgl. 27 Februari 2023			
		Soil Devider	2 unit	64.640.000	-	64.640.000	PSE	0,40	100,00	0,4	58.600.000	90,66	6.040.000	9,34	0031299/LS/2023 Tgl. 22/11/2023	58.600.000	CV. CAHAYA BINTANG ENERGI	58.600.000	027/9205/2023 Tgl. 13 Juli 2023			
		Analytical Balance 220 gr/0,1 mg	2 unit	107.464.000	-	107.464.000	PSE	0,66	100,00	0,7	98.750.000	91,89	8.714.000	8,11	0027463/LS/2023 Tgl. 19/10/2023	98.750.000	CV. CAHAYA BINTANG ENERGI	98.750.000	027/9209/2023 Tgl. 13 Juli 2023			
		Autoclave	1 unit	49.490.000	-	49.490.000	PSE	0,31	0,00	-	0,00									Tdk dilaksanakan		
		Batu/Anak Timbangan Type E2 1 g/2000g	1 unit	198.190.280	-	198.190.280	PSE	1,22	100,00	1,2	48.750.000	81,99	35.690.280	18,01	0010116/LS/2023 Tgl. 31/05/2023	48.750.000	CV. CAHAYA BINTANG ENERGI	162.500.000	027/5961/2023 Tgl. 15 Mei 2023		UMK 30%	
											113.750.000				0021005/LS/2023 Tgl. 25/08/2023	113.750.000				100%		
		Desticator Vacuum	9 unit	132.986.700	-	132.986.700	PSE	0,82	100,00	0,8	115.450.000	86,81	17.536.700	13,19	0031299/LS/2023 Tgl. 22/11/2023	115.450.000	CV. CAHAYA BINTANG ENERGI	115.450.000	027/9205/2023 Tgl. 13 Juli 2023			
		Electronic Balance	2 unit	29.492.000	-	29.492.000	PSE	0,18	100,00	0,2	25.950.000	87,99	3.542.000	12,01	0027463/LS/2023 Tgl. 19/10/2023	25.950.000	CV. CAHAYA BINTANG ENERGI	25.950.000	027/9209/2023 Tgl. 13 Juli 2023			
		Magnifier Lamp	6 unit	8.928.198	-	8.928.198	PSE	0,06	100,00	0,1	7.340.000	82,21	1.588.198	17,79	0031299/LS/2023 Tgl. 22/11/2023	7.340.000	CV. CAHAYA BINTANG ENERGI	7.340.000	027/9205/2023 Tgl. 13 Juli 2023			
		Mini Soil Devider	2 unit	113.544.200	-	113.544.200	PSE	0,70	100,00	0,7	31.080.000	91,24	9.944.200	8,76	0010116/LS/2023 Tgl. 31/05/2023	31.080.000	CV. CAHAYA BINTANG ENERGI	103.600.000	027/5961/2023 Tgl. 15 Mei 2023		UMK 30%	
											72.520.000				0021005/LS/2023 Tgl. 25/08/2023	72.520.000				100%		
		Microscope Compound	3 unit	136.350.000	-	136.350.000	PSE	0,84	100,00	0,8	135.850.000	99,63	500.000	0,37	0035598/LS/2023 Tgl. 8/12/2023	135.850.000	CV. CAHAYA BINTANG ENERGI	135.850.000	027/9207/2023 Tgl. 13 Juli 2023			
		Miskroskop Stereo	5 unit	328.250.000	-	328.250.000	PSE	2,02	100,00	2,0	326.750.000	99,54	1.500.000	0,46	0035598/LS/2023 Tgl. 8/12/2023	326.750.000	CV. CAHAYA BINTANG ENERGI	326.750.000	027/9207/2023 Tgl. 13 Juli 2023			

NO	KODE	NOMENKLATUR MENU KEGIATAN	Vol/Sat	Pagu Anggaran Sesuai PMK (Rp.)	(5%) Dana Penunjang dari Usulan Pagu Alokasi	TOTAL DAK	Metode Pengadaan Barang dan Jasa	Bobot	Realisasi				SISA ANGGARAN			SP 2 D		DAFTAR KONTRAK			Ket.
									Fisik		Keuangan		Rp.	(%)	Nomor/Tgl.	Jumlah	Nama Perusahaan	Nilai Kontrak (Rp.)	Nomor Kontrak		
									(%)	TTB	(Rp.)	(%)									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							PSE	1,50	100,00	0,00		0,00								Tdk dilaksanakan	
		Moisture Analyser AHD MX-50	6 unit	242.400.000	-	242.400.000	PSE	0,04	100,00	0,0	5.980.000	94,92	320.000	5,08	0031299/LS/2023 Tgl. 22/11/2023	5.980.000	CV. CAHAYA BINTANG ENERGI	5.980.000	027/9205/2023 Tgl. 13 Juli 2023		
		Thermo Couple	6 unit	6.300.000	-	6.300.000	PSE	0,45	100,00	0,5	59.500.000	81,36	13.636.120	18,64	0027463/LS/2023 Tgl. 19/10/2023	59.500.000	CV. CAHAYA BINTANG ENERGI	59.500.000	027/9209/2023 Tgl. 13 Juli 2023		
		Top Loading Balance	2 unit	73.136.120	-	73.136.120	PSE	1,12	100,00	1,1	179.248.350	99,03	1.751.650	0,97	0021439/LS/2023 Tgl. 30/08/2023	179.248.350	CV. GENERASI MANDIRI	179.248.350	027/9283/2023 Tgl. 14 Juli 2023		
		Generator/Geneset Diesel 15 KVA	1 unit	181.000.000	-	181.000.000	PSE													Tdk memenuhi kriteria teknis	
		T60 UV Visible Spectrophotometer	1 Pkt	3.284.640.736	-	3.284.640.736	PSE	20,26	0,00	-	0,00									Tdk dilaksanakan	
		Operasional Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (DAK)	1 pkt	175.859.366	-	175.859.366	SWA	1,08	25,00	0,3											

NO	KODE	NOMENKLATUR MENU KEGIATAN	Vol/Sat	Pagu Anggaran Sesuai PMK (Rp.)	(5%) Dana Penunjang dari Usulan Pagu Alokasi	TOTAL DAK	Metode Pengadaan Barang dan Jasa	Bobot	Realisasi				SISA ANGGARAN		SP 2 D		DAFTAR KONTRAK			Ket.
									Fisik		Keuangan		Rp.	(%)	Nomor/Tgl.	Jumlah	Nama Perusahaan	Nilai Kontrak (Rp.)	Nomor Kontrak	
									(%)	TTB	(Rp.)	(%)								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		- Pengawasan	1 pkt	-	3.400.000	3.400.000	PL	0,02	100,00	0,0	3.374.998	99,26	25.002	0,74	0037146/LS/2023 Tgl. 08/12/2023	3.374.998	CV. MITRA KONSORSIUM	3.374.998	700/8483/2023 Tgl. 03 Juli 2023	
		Rehabilitasi Pagar Komplek Laboratorium PHP Peureulak - Aceh Timur	1 pkt	150.000.000	-	150.000.000	PL	0,93	100,00	0,9	149.807.000	99,87	193.000	0,13	0036575/LS/2023 Tgl. 08/12/2023	149.807.000	CV. ANDELA SAKTI GROUP	149.807.000	011/8121/2023 Tgl. 23 Juni 2023	
		- Perencanaan	1 pkt	-	4.500.000	4.500.000	PL	0,03	100,00	0,0	4.486.050	99,69	13.950	0,31	0007918/LS/2023 Tgl. 03/05/2023	4.486.050	PT. PUTRA ANDESPAL PERKASA	4.486.050	050/2943/2023 Tgl. 15 Maret 2023	
		- Pengawasan	1 pkt	-	3.000.000	3.000.000	PL	0,02	100,00	0,0	2.982.428	99,41	17.572	0,59	0037132/LS/2023 Tgl. 08/12/2023	2.982.428	PT. PUTRA ANDESPAL PERKASA	2.982.428	700/8485/2023 Tgl. 3 Juli 2023	
09.02.10.01.1734		Laboratorium Pengamanan Hama dan Penyakit TPH Keumala Pidie		1.790.000.000	89.500.000	1.879.500.000		11,99	100,00	11,6	1.866.231.147	99,29	13.268.853	0,71		1.866.231.147		1.866.231.147		
		Renovasi Lab PHP TPH Keumala Pidie	1 pkt	600.000.000	-	600.000.000	TE	3,70	100,00	3,7	179.466.000	99,70	1.780.000	0,30	0014270/LS/2023 Tgl. 04/07/2023	179.466.000	CV. BERKAH SABENA	598.220.000	011/8021/2023 Tgl. 22 Juni 2023	30%
		- Perencanaan	1 pkt	-	18.000.000	18.000.000	PL	0,11	100,00	0,1	17.944.201	99,69	55.800	0,31	0007918/LS/2023 Tgl. 15/11/2023	17.944.201	PT. PUTRA ANDESPAL PERKASA	17.944.201	050/2943/2023 Tgl. 15 Maret 2023	100%
		- Pengawasan	1 pkt	-	12.000.000	12.000.000	PL	0,07	100,00	0,1	11.943.000	99,53	57.000	0,48	0032152/LS/2023 Tgl. 29/11/2023	11.943.000	CV. ASCARVA KONSULTAN	11.943.000	700/8187/2023 Tgl. 26 Juni 2023	
		Renovasi Rumah Kaca Laboratorium PHP Keumala Pidie	1 pkt	160.000.000	-	160.000.000	PL	0,99	100,00	1,0	47.763.600	99,51	788.000	0,49	0023603/LS/2023 Tgl. 14/09/2023	47.763.600	CV. JUANG KARYA	159.212.000	011/8115/2023 Tgl. 23 Juni 2023	UMK 30%
		- Perencanaan	1 pkt	-	4.800.000	4.800.000	PL	0,03	100,00	0,0	4.785.120	99,69	14.880	0,31	0007918/LS/2023 Tgl. 03/05/2023	4.785.120	PT. PUTRA ANDESPAL PERKASA	4.785.120	050/2943/2023 Tgl. 15 Maret 2023	100%
		- Pengawasan	1 pkt	-	3.200.000	3.200.000	PL	0,02	100,00	0,0	3.182.429	99,45	17.571	0,55	0037132/LS/2023 Tgl. 08/12/2023	3.182.429	PT. PUTRA ANDESPAL PERKASA	3.182.429	700/8485/2023 Tgl. 3 Juli 2023	
		Renovasi Rumah Kaca Laboratorium PHP Keumala Pidie	1 pkt	150.000.000	-	150.000.000	PL	0,93	100,00	0,9	44.746.500	99,44	845.000	0,56	0023649/LS/2023 Tgl. 14/09/2023	44.746.500	CV. CAHYA NANGGROE	149.155.000	011/8113/2023 Tgl. 23 Juni 2023	UMK 30%
		- Perencanaan	1 pkt	-	4.500.000	4.500.000	PL	0,03	100,00	0,0	4.486.050	99,69	13.950	0,31	0007918/LS/2023 Tgl. 03/05/2023	4.486.050	PT. PUTRA ANDESPAL PERKASA	4.486.050	050/2943/2023 Tgl. 15 Maret 2023	100%
		- Pengawasan	1 pkt	-	3.000.000	3.000.000	PL	0,02	100,00	0,0	2.982.429	99,41	17.571	0,59	0037132/LS/2023 Tgl. 08/12/2023	2.982.429	PT. PUTRA ANDESPAL PERKASA	2.982.429	700/8485/2023 Tgl. 3 Juli 2023	
		Renovasi Rumah Jaga Lab Keumala	1 pkt	200.000.000	-	200.000.000	PL	1,23	100,00	1,2	59.806.500	99,68	645.000	0,32	0023650/LS/2023 Tgl. 14/09/2023	59.806.500	PT. SINAR HARAPAN BERSAUDARA	199.355.000	011/8466/2023 Tgl. 3 Juli 2023	UMK 30%
		- Perencanaan	1 pkt	-	6.000.000	6.000.000	PL	0,04	100,00	0,0	5.871.904	97,87	128.096	2,13	0030635/LS/2023 Tgl. 13/11/2023	139.548.500	PT. PUTRA ANDESPAL PERKASA	5.871.904	050/2945/2023 Tgl. 15 Maret 2023	100%

NO	KODE	NOMENKLATUR MENU KEGIATAN	Vol/Sat	Pagu Anggaran Sesuai PMK (Rp.)	(5%) Dana Penunjang dari Usulan Pagu Alokasi	TOTAL DAK	Metode Pengadaan Barang dan Jasa	Bobot	Realisasi				SISA ANGGARAN		SP 2 D		DAFTAR KONTRAK			Ket.
									Fisik		Keuangan		Rp.	(%)	Nomor/Tgl.	Jumlah	Nama Perusahaan	Nilai Kontrak (Rp.)	Nomor Kontrak	
									(%)	TTB	(Rp.)	(%)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - ACEH. Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III	200 OH	-	111.200.000	SWA	0,69	70,00	0,5	7.280.000	93,75			0037485/LS/2023 Tgl. 11/12/2023	7.280.000					
										71.663.960				0035271/GU/2023 Tgl. 07/11/2023	71.663.960				GU 7	
										16.530.000				0024700/GU/2023 Tgl. 26/09/2023	16.530.000				GU 5	
										8.774.200				0019794/GU/2023 Tgl. 11/08/2023	8.774.200				GU IV	
		Satuan Biaya Transportasi Darat Pulang Pergi (PP). Spesifikasi : Banda Aceh - Kab. Aceh Singkil	100 OP	-	42.000.000	SWA	0,26	50,00	0,1	14.440.000	81,74			0010012/GU/2023 Tgl. 31/05/2023	14.440.000				GU II	
										11.560.000				0015633/GU/2023 Tgl. 18/07/2023	11.560.000				GU II	
										8.332.400				0015633/GU/2023 Tgl. 18/07/2023	8.332.400				GU III	
		Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : ACEH	200 OH	-	72.000.000	SWA	0,44	65,00	0,3	46.806.413	65,01			0029394/GU/2023 Tgl. 03/11/2023	46.806.413				GU 6	
		Luar Daerah :																		
		Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas (Pejabat Eselon II/Golongan IV) 3 Org x 3 Mlm x 2 Kali.	18 OH	17.856.000	-	17.856.000	SWA	0,11	20,00	0,0	0,00									
		Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas (Pejabat Eselon IV/Golongan III) 3 Org x 3 Mlm x 2 Kali.	18 OH	13.140.000	-	13.140.000	SWA	0,08	0,00	-	0,00									
		Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (6 Org x 4 Mlm x 2 kali)	48 OH	25.440.000	-	25.440.000	SWA	0,16	0,00	-	0,00									
		Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (6 Org x 2 kali x 2 kali)	24 org/Kli	6.144.000	-	6.144.000	SWA	0,04	0,00	-	0,00									
		Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Ekonomi	15,46 OK	69.440.000	-	69.440.000	SWA	0,43	0,00	-	0,00									
		Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan																	tdk ada dim juknis DAK	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah (Peninggung Jawab)	24 OB	16.800.000	-	16.800.000	SWA	0,10	0,00	-	0,00									
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah (Ketua)	24 OB	15.600.000	-	15.600.000	SWA	0,10	0,00	-	0,00									
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah (Anggota)	84 OB	42.000.000	-	42.000.000	SWA	0,26	0,00	-	0,00									
		Pengadaan dan Dokumen Kegiatan DAK	16,355 lbr	5.724.200	-	5.724.200	SWA	0,04	0,00	-	0,00								tdk ada dim juknis DAK	
09.02.10.04.1733		Pengadaan Peralatan PHP/LAH Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit TPT Pesureulak Aceh Timur.		1.984.675.600	-	1.984.675.600		12,24	100,00	12,24	1.788.105.680	90,10	196.569.920	9,90		1.788.105.680				
		Sarana Pendukung LPHP :		199.999.999	-	199.999.999		1,23	100,00	1,23	167.617.670	83,81	32.382.379	16,19		167.617.670				
		Biological microscope	1,00 unit	72.497.118	-	72.497.118	PSE	0,45	100,0	0,4	16.725.000	76,90	16.747.118	23,10	0014159/LS/2023 Tgl. 03/07/2023	16.725.000	CV. MANDIRI JAYA	55.750.000	027/7401/2023 Tgl. 12 Juni 2023	UMK 30%
											39.025.000			0031080/LS/2023 Tgl. 20/11/2023	39.025.000				100%	
		kompor Gas 1 tungku	1,00 unit	750.000	-	750.000	PSE	0,00	100,00	0,0	670.000	89,33	80.000	10,67	0011784/LS/2023 Tgl. 15/06/2023	670.000	CV. HANADAWA	670.000	027/6202/2023 Tgl. 19 Mei 2023	
		Tabung Gas	1,00 unit	625.000	-	625.000	PSE	0,00	100,00	0,0	560.000	89,60	65.000	10,40	0011784/LS/2023 Tgl. 15/06/2023	560.000	CV. HANADAWA	560.000	027/6202/2023 Tgl. 19 Mei 2023	

NO	KODE	NOMENKLATUR MENU KEGIATAN	Vol/Sat	Pagu Anggaran Sesuai PMK (Rp.)	(5%) Dana Penunjang dari Usulan Pagu Alokasi	TOTAL DAK	Metode Pengadaan Barang dan Jasa	Bobot	Realisasi			SISA ANGGARAN		SP2 D			DAFTAR KONTRAK			Ket.
									Fisik		Keuangan		Rp.	%	Nomor/Tgl.	Jumlah	Nama Perusahaan	Nilai Kontrak (Rp.)	Nomor Kontrak	
									(%)	TTB	(Rp.)	(%)								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Lemari 3 Pintu	1,00 unit	5.000.000	-	5.000.000	PSE	0,03	100,00	0,0	4.982.790	99,66	17.210	0,34	0011789/15/2023 Tgl. 15/06/2023	4.982.790	CV. PUTRA BUNGFUI	4.982.790	027/6206/2023 Tgl. 19 Mei 2023	
		Incubator For Laboratorium	1,00 unit	67.880.000	-	67.880.000	PSE	0,42	100,00	0,4	52.750.000	77,71	15.130.000	22,29	0020893/15/2023 Tgl. 24/08/2023	52.750.000	CV. MITRA NUSANTARA	52.750.000	027/7403/2023 Tgl. 12 Juni 2023	
		Rak Besi Tempahan Model Tiga Tingkat (P 240 x L 120 x T 600 cm)	1,00 unit	14.520.000	-	14.520.000	PSE	0,09	100,00	0,1	14.450.000	99,52	70.000	0,48	0018246/15/2023 Tgl. 03/08/2023	14.450.000	CV. PUTRA BUNGFUI	14.450.000	027/8107/2023 Tgl. 23 Juni 2023	
		Kulkas 2 Pintu Kap. 196 ltr	1,00 unit	4.289.100	-	4.289.100	PSE	0,03	100,00	0,0	4.250.000	99,09	39.100	0,91	0006167/15/2023 Tgl. 13/04/2023	4.250.000	CV. SONY ELECTRONIC	4.250.000	027/3501/2023 Tgl. 27 Maret 2023	
		Blender Ukuran Besar	1,08 unit	360.775	-	360.775	PSE	0,00	100,00	0,0	310.000	85,93	50.775	14,07	0011784/15/2023 Tgl. 15/06/2023	310.000	CV. HANADAWA	310.000	027/6202/2023 Tgl. 19 Mei 2023	
		Timbangan digital KD-810 (10. Bahan Laboratorium)	2,00 unit	1.078.006	-	1.078.006	PSE	0,01	100,00	0,0	1.052.280	97,61	25.726	2,39	0011647/15/2023 Tgl. 14/06/2023	1.052.280	CV. HANADAWA	1.052.280	027/6204/2023 Tgl. 19 Mei 2023	
		Lemari Filling Cabinet Pintu Kaca	1,00 unit	3.000.000	-	3.000.000	PSE	0,02	100,00	0,0	2.952.600	98,42	47.400	1,58	0011789/15/2023 Tgl. 15/06/2023	2.952.600	CV. PUTRA BUNGFUI	2.952.600	027/6206/2023 Tgl. 19 Mei 2023	
		CCTV	1,00 unit	30.000.000	-	30.000.000	PSE	0,19	100,00	0,2	29.890.000	99,63	110.000	0,37	0020249/15/2023 Tgl. 16/08/2023	29.890.000	CV. SAHABI BERKAH MAKMU	29.890.000	027/7803/2023 Tgl. 13 Juni 2023	
99.02.10.04.1734		Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit TPH Pidle Keumala Sarana Pendukung LPHP :		200.000.000	-	200.000.000		1,23	100,00	1,23	167.617.670	83,81	32.382.330	16,19		167.617.670				
		Biological Microscope	1,00 unit	72.497.119	-	72.497.119	PSE	0,45	100,00	0,4	16.725.000	76,90	16.747.119	23,10	0014159/15/2023 Tgl. 03/07/2023	16.725.000	CV. MANDIRI JAYA	55.750.000	027/7401/2023 Tgl. 12 Juni 2023	UMK 30%
		kompor Gas 1 tungku	1,00 unit	750.000	-	750.000	PSE	0,00	100,00	0,0	670.000	89,33	80.000	10,67	0011784/15/2023 Tgl. 15/06/2023	670.000	CV. HANADAWA	670.000	027/6202/2023 Tgl. 19 Mei 2023	
		Tabung Gas	1,00 unit	625.000	-	625.000	PSE	0,00	100,00	0,0	560.000	89,60	65.000	10,40	0011784/15/2023 Tgl. 15/06/2023	560.000	CV. HANADAWA	560.000	027/6202/2023 Tgl. 19 Mei 2023	
		Lemari 3 Pintu	1,00 unit	5.000.000	-	5.000.000	PSE	0,03	100,00	0,0	4.982.790	99,66	17.210	0,34	0011789/15/2023 Tgl. 15/06/2023	4.982.790	CV. PUTRA BUNGFUI	4.982.790	027/6206/2023 Tgl. 19 Mei 2023	
		Incubator For Laboratorium	1,00 unit	67.880.000	-	67.880.000	PSE	0,42	100,00	0,4	52.750.000	77,71	15.130.000	22,29	0020893/15/2023 Tgl. 24/08/2023	52.750.000	CV. MITRA NUSANTARA	52.750.000	027/7403/2023 Tgl. 12 Juni 2023	
		Rak Besi Tempahan Model Tiga Tingkat (P 240 x L 120 x T 600 cm)	1,00 unit	14.520.000	-	14.520.000	PSE	0,09	100,00	0,1	14.450.000	99,52	70.000	0,48	0018246/15/2023 Tgl. 03/08/2023	14.450.000	CV. PUTRA BUNGFUI	14.450.000	027/8107/2023 Tgl. 23 Juni 2023	
		Kulkas 2 Pintu Kap. 196 ltr	1,00 unit	4.289.100	-	4.289.100	PSE	0,03	100,00	0,0	4.250.000	99,09	39.100	0,91	0006167/15/2023 Tgl. 13/04/2023	4.250.000	CV. SONY ELECTRONIC	4.250.000	027/3501/2023 Tgl. 27 Maret 2023	
		Blender Ukuran Besar	1,08 unit	360.775	-	360.775	PSE	0,00	100,00	0,0	310.000	85,93	50.775	14,07	0011784/15/2023 Tgl. 15/06/2023	310.000	CV. HANADAWA	310.000	027/6202/2023 Tgl. 19 Mei 2023	
		Timbangan digital KD-810 (10. Bahan Laboratorium)	2,00 unit	1.078.006	-	1.078.006	PSE	0,01	100,00	0,0	1.052.280	97,61	25.726	2,39	0011647/15/2023 Tgl. 14/06/2023	1.052.280	CV. HANADAWA	1.052.280	027/6204/2023 Tgl. 19 Mei 2023	
		Lemari Filling Cabinet Pintu Kaca	1,00 unit	3.000.000	-	3.000.000	PSE	0,02	100,00	0,0	2.952.600	98,42	47.400	1,58	0011789/15/2023 Tgl. 15/06/2023	2.952.600	CV. PUTRA BUNGFUI	2.952.600	027/6206/2023 Tgl. 19 Mei 2023	
		CCTV	1,00 unit	30.000.000	-	30.000.000	PSE	0,19	100,00	0,2	29.890.000	99,63	110.000	0,37	0020249/15/2023 Tgl. 16/08/2023	29.890.000	CV. SAHABI BERKAH MAKMU	29.890.000	027/7803/2023 Tgl. 13 Juni 2023	

NO	KODE	NOMENKLATUR MENU KEGIATAN	Vol/Sat	Pagu Anggaran Sesuai PMK (Rp.)	(5%) Dana Penunjang dari Usulan Pagu Alokasi	TOTAL DAK	Metode Pengadaan Barang dan Jasa	Bobot	Realisasi				SISA ANGGARAN		SP 2 D		DAFTAR KONTRAK			Ket.
									Fisik		Keuangan		Rp.	(%)	Nomor/Tgl.	Jumlah	Nama Perusahaan	Nilai Kontrak (Rp.)	Nomor Kontrak	
									(%)	TTB	(Rp.)	(%)								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	09.02.10.04.1735	Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit TPH Pulo le Nagan Raya Sarana Pendukung LPHP :		200.000.000	-	200.000.000		1,23	100,00	1,23	167.617.670	83,81	32.382.330	16,19		167.617.670		167.617.670		
		Biological Microscope	1,00 unit	72.497.119	-	72.497.119	PSE	0,45	100,00	0,4	16.725.000	76,90	16.747.119	23,10	0014159/15/2023 Tgl. 03/07/2023	16.725.000	CV. MANDIRI JAYA	55.750.000	027/7401/2023 Tgl. 12 Juni 2023	UMK 30%
											39.025.000				0031080/15/2023 Tgl. 20/11/2023	39.025.000			100%	
		kompur Gas 1 tungku	1,00 unit	750.000	-	750.000	PSE	0,00	100,00	0,0	670.000	89,33	80.600	10,67	0011784/15/2023 Tgl. 15/06/2023	670.000	CV. HANADAWA	670.000	027/5202/2023 Tgl. 19 Mei 2023	
		Tabung Gas	1,00 unit	625.000	-	625.000	PSE	0,00	100,00	0,0	560.000	89,60	65.000	10,40	0011784/15/2023 Tgl. 15/06/2023	560.000	CV. HANADAWA	560.000	027/6202/2023 Tgl. 19 Mei 2023	
		Lemari 3 Pintu	1,00 unit	5.000.000	-	5.000.000	PSE	0,03	100,00	0,0	4.982.790	99,66	17.210	0,34	0011789/15/2023 Tgl. 15/06/2023	4.982.790	CV. PUTRA BUNGFUI	4.982.790	027/6206/2023 Tgl. 19 Mei 2023	
		Incubator For Laboratorium	1,00 unit	67.880.000	-	67.880.000	PSE	0,42	100,00	0,4	52.750.000	77,71	15.130.000	22,29	0020893/15/2023 Tgl. 24/08/2023	52.750.000	CV. MITRA NUSANTARA	52.750.000	027/7403/2023 Tgl. 12 Juni 2023	
		Rak Besi Tempahan Model Tiga Tingkat (P 240 x L 120 x T 600 cm)	1,00 unit	14.520.000	-	14.520.000	PSE	0,09	100,00	0,1	14.450.000	99,52	70.000	0,48	0018246/15/2023 Tgl. 03/08/2023	14.450.000	CV. PUTRA BUNGFUI	14.450.000	027/8107/2023 Tgl. 23 Juni 2023	
		Kulkas 2 Pintu Kap. 196 Ltr	1,00 unit	4.289.100	-	4.289.100	PSE	0,03	100,00	0,0	4.250.000	99,09	39.100	0,91	0006167/15/2023 Tgl. 13/04/2023	4.250.000	CV. SONY ELECTRONIC	4.250.000	027/3501/2023 Tgl. 27 Maret 2023	
		Blender Ukuran Besar	1,08 unit	350.775	-	360.775	PSE	0,00	100,00	0,0	310.000	85,93	50.775	14,07	0011784/15/2023 Tgl. 15/06/2023	310.000	CV. HANADAWA	310.000	027/6202/2023 Tgl. 19 Mei 2023	
		Timbangan digital KD-810 (10. Bahan Laboratorium)	2,00 unit	1.078.006	-	1.078.006	PSE	0,01	100,00	0,0	1.052.280	97,61	25.726	2,39	0011647/15/2023 Tgl. 14/06/2023	1.052.280	CV. HANADAWA	1.052.280	027/6204/2023 Tgl. 19 Mei 2023	
		Lemari Filling Cabinet Pintu Kaca	1,00 unit	3.000.000	-	3.000.000	PSE	0,02	100,00	0,0	2.952.600	98,42	47.400	1,58	0011789/15/2023 Tgl. 15/06/2023	2.952.600	CV. PUTRA BUNGFUI	2.952.600	027/6206/2023 Tgl. 19 Mei 2023	
		CCTV	1 unit	30.000.000	-	30.000.000	PSE	0,19	100,00	0,2	29.890.000	99,63	110.000	0,37	0020249/15/2023 Tgl. 16/08/2023	29.890.000	CV. SAHABI BERKAH MAKMU	29.890.000	027/7803/2023 Tgl. 13 Juni 2023	
																1.285.252.670				
	09.02.10.04.1736	Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit TPH Kuta Alam Banda Aceh Sarana Pendukung LPHP :		1.384.675.600	-	1.384.675.600		8,54	100,00	8,54	1.285.255.670	92,82	99.422.930	7,18		1.285.252.670				
		Biological Microscope	1 unit	72.497.119	-	72.497.119	PSE	0,45	100,00	0,4	16.725.000	76,90	16.747.119	23,10	0014159/15/2023 Tgl. 03/07/2023	16.725.000	CV. MANDIRI JAYA	55.750.000	027/7401/2023 Tgl. 12 Juni 2023	UMK 30%
											39.025.000				0031080/15/2023 Tgl. 20/11/2023	39.025.000			100%	
		kompur Gas 1 tungku	1 unit	750.000	-	750.000	PSE	0,00	100,00	0,0	670.000	89,33	80.000	10,67	0011784/15/2023 Tgl. 15/06/2023	670.000	CV. HANADAWA	670.000	027/6202/2023 Tgl. 19 Mei 2023	
		Tabung Gas	1 unit	625.000	-	625.000	PSE	0,00	100,00	0,0	560.000	89,60	65.000	10,40	0011784/15/2023 Tgl. 15/06/2023	560.000	CV. HANADAWA	560.000	027/6202/2023 Tgl. 19 Mei 2023	
		Lemari 3 Pintu	1 unit	5.000.000	-	5.000.000	PSE	0,03	100,00	0,0	4.982.790	99,66	17.210	0,34	0011789/15/2023 Tgl. 15/06/2023	4.982.790	CV. PUTRA BUNGFUI	4.982.790	027/6206/2023 Tgl. 19 Mei 2023	
		Incubator For Laboratorium	1 unit	67.880.000	-	67.880.000	PSE	0,42	100,00	0,4	52.750.000	77,71	15.130.000	22,29	0020893/15/2023 Tgl. 24/08/2023	52.750.000	CV. MITRA NUSANTARA	52.750.000	027/7403/2023 Tgl. 12 Juni 2023	
		Rak Besi Tempahan Model Tiga Tingkat (P 240 x L 120 x T 600 cm)	1 unit	14.520.000	-	14.520.000	PSE	0,09	100,00	0,1	14.450.000	99,52	70.000	0,48	0018246/15/2023 Tgl. 03/08/2023	14.450.000	CV. PUTRA BUNGFUI	14.450.000	027/8107/2023 Tgl. 23 Juni 2023	
		Kulkas 2 Pintu Kap. 196 Ltr	1 unit	4.289.100	-	4.289.100	PSE	0,03	100,00	0,0	4.250.000	99,09	39.100	0,91	0006167/15/2023 Tgl. 13/04/2023	4.250.000	CV. SONY ELECTRONIC	4.250.000	027/3501/2023 Tgl. 27 Maret 2023	

No	Kode	NOMENKLATUR MENU KEGIATAN	Vol/Set	Pagu Anggaran Sesuai PMK (Rp.)	(5%) Dana Penunjang dari Usulan Pagu Alokasi	TOTAL DAK	Metode Pengadaan Barang dan Jasa	Bobot	Realisasi				SISA ANGGARAN		SP 2 D			DAFTAR KONTRAK			Ket.
									Fisik		Keuangan		Rp.	%	Nomor /Tgl.	Jumlah	Nama Perusahaan	Nilai Kontrak (Rp.)	Nomor Kontrak		
									%	TTB	(Rp.)	%									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Blender Ukuran Besar	1 unit	360.775	-	360.775	PSE	0,00	100,00	0,0	310.000	85,93	50.775	14,07	0011784/LS/2023 Tgl. 15/06/2023	310.000	CV. HANADAWA	310.000	027/6202/2023 Tgl. 19 Mei 2023		
		Timbangan digital KD-810 (10. Bahan Laboratorium)	2 unit	1.078.006	-	1.078.006	PSE	0,01	100,00	0,0	1.052.280	97,61	25.726	2,39	0011647/LS/2023 Tgl. 14/06/2023	1.052.280	CV. HANADAWA	1.052.280	027/6204/2023 Tgl. 19 Mei 2023		
		Lemari Filling Cabinet Pintu Kaca	1 unit	3.000.000	-	3.000.000	PSE	0,02	100,00	0,0	2.952.600	98,42	47.400	1,58	0011789/LS/2023 Tgl. 15/06/2023	2.952.600	CV. PUTRA BUNGFUJ	2.952.600	027/6206/2023 Tgl. 19 Mei 2023		
		CCTV	1 unit	30.000.000	-	30.000.000	PSE	0,19	100,00	0,2	29.890.000	99,63	110.000	0,37	0020249/LS/2023 Tgl. 16/08/2023	29.890.000	CV. SAHABI BERKAH MAKMU	29.890.000	027/7803/2023 Tgl. 13 Juni 2023		
		Pendingin Ruangan (2 PK)	12 unit	120.000.000	-	120.000.000	PSE	0,74	100,00	0,7	118.200.000	98,50	1.800.000	1,50	0006167/LS/2023 Tgl. 13/04/2023	118.200.000	CV. SONY ELECTRONIC	118.200.000	027/3501/2023 Tgl. 27 Maret 2023		
		Pengadaan Laptop Sarana Pendukung Petugas Lab. BPTPHP dan Koordinator PHP.	38 unit	760.000.000	-	760.000.000	PSE	4,69	100,00	4,7	715.815.000	94,71	40.185.000	5,29	0008705/LS/2023 Tgl. 15/05/2023	719.815.000	PT. CEMPAKA SINERGY BERSAMA	719.815.000	027/2941/2023 Tgl. 15 Maret 2023		
		Global Positioning System (GPS)	10 unit	68.000.000	-	68.000.000	PSE	0,42	100,00	0,4	60.500.000	88,97	7.500.000	11,03	0019294/LS/2023 Tgl. 09/08/2023	60.500.000	CV. TRI SAKA ABYUDAYA	60.500.000	520/8951/2023 Tgl. 11 Juli 2023		
		Kursi Rapat	110 unit	93.500.000	-	93.500.000	PSE	0,58	100,00	0,6	85.800.000	91,76	7.700.000	8,24	0005762/LS/2023 Tgl. 12/04/2023	85.800.000	CV. YUNARISCO	85.800.000	027/3585/2023 Tgl. 28 Maret 2023		
		Kamera Digital DSLR	6 unit	143.175.600	-	143.175.600	PSE	0,88	100,00	0,9	133.320.000	93,12	9.855.600	6,88	0006168/LS/2023 Tgl. 13/04/2023	133.320.000	PT. TURBO MITRA PERKASA	133.320.000	027/3663/2023 Tgl. 29 Maret 2023		
		JUMLAH		15.685.987.000	527.450.000	16.213.437.000		100,00	74,44	74,49	11.157.725.680	68,79	1.072.020.606	9,11		10.552.745.540		11.191.034.032			

KEPADA BANDA ACEH, 29 Desember 2023
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

(Signature)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
(Ir. CUTHI ZAIMAH, MP.)
PENGHIMPUNAN
NIP. 19660117199203 2 003

LAPORAN ANGARAN DAN REALISASI BELANJA PENGENDALIAN INFLASI
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

No	Program	Sub Kegiatan	Uraian Rekening	Pagu APBA-P	Realisasi 2023	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
1	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Belanja Barang dan Jasa	2.292.164.200	1.997.655.860	87,15
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.984.675.600	1.788.783.280	90,13
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.271.000.000	5.177.217.178	98,22
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Belanja Barang dan Jasa	25.550.229.263	25.538.883.969	99,96
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Belanja Barang dan Jasa	25.955.242.067	25.458.374.486	98,09
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Belanja Barang dan Jasa	4.986.181.297	4.983.609.297	99,95
		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Belanja Barang dan Jasa	20.225.854.044	20.215.965.894	99,95
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.800.000	83.800.000	100,00
			Jumlah	86.349.146.471	85.244.289.964	98,72

Banda Aceh, 31 Desember 2023
PENGUNA ANGGARAN
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Dr. Cut Yuzamah, MP, P
NIP. 19660217 199203 2 003

PEMERINTAH ACEH
REGISTER MEMORIAL
TAHUN ANGGARAN 2023

SKPA : 3.27.0.00.0.00.01. - DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

Hal 1 dari 5

TANGGAL	NO.BM	JENIS BUKTI	URAIAN	REF	JUMLAH (Rp)	
					DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5	6	7
01-01-2023	014/JB-EKUITAS/3.27.0.00.0.00.01./2023	LO	JURNAL BALIK EKUITAS TA 2022	JURNAL BALIK EKUITAS TA 2022	315.319.821.270	315.319.821.270
31-01-2023	001/PDPT-LO/BLUD/3.27.0.00.0.00.01/2023	LO	BLUD JANUARI MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD JANUARI	2.897.223	2.897.223
31-01-2023	001/PDPT-LRA/BLUD/3.27.0.00.0.00.01/2023	LRA	BLUD JANUARI MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD JANUARI	2.897.223	2.897.223
13-02-2023	007/UTANG-BEBAN/3.27.0.00.0.00.01/2023	LO	PEMBAYARAN UTANG LISTRIK AIR INTERNET DES TA 2022	PEMBAYARAN UTANG LISTRIK AIR INTERNET DES 2022	191.891.191	191.891.191
28-02-2023	002/PDPT-LO/BLUD/3.27.0.00.0.00.01/2023	LO	BLUD FEBRUARI MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD FEBRUARI	2.852.714	2.852.714
28-02-2023	002/PDPT-LRA/BLUD/3.27.0.00.0.00.01/2023	LRA	BLUD FEBRUARI MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD FEBRUARI	2.852.714	2.852.714
31-03-2023	003/PDPT-LO/BLUD/3.27.0.00.0.00.01/2023	LO	BLUD MARET MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD MARET	5.571.369	5.571.369
31-03-2023	003/PDPT-LRA/BLUD/3.27.0.00.0.00.01/2023	LRA	BLUD MARET MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD MARET	5.571.369	5.571.369
30-04-2023	004/PDPT-LO/BLUD/3.27.0.00.0.00.01/2023	LO	BLUD APRIL MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD APRIL	3.677.059	3.677.059
30-04-2023	004/PDPT-LRA/BLUD/3.27.0.00.0.00.01/2023	LRA	BLUD APRIL MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD APRIL	3.677.059	3.677.059
31-05-2023	005/BELN-LO/BLUD/3.27.0.00.0.00.01/2023	LO	BLUD MEI MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD MEI	658.339	658.339
31-05-2023	005/BELN-LRA/BLUD/3.27.0.00.0.00.01/2023	LRA	BLUD MEI MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD MEI	658.339	658.339
31-05-2023	005/PDPT-LO/BLUD/3.27.0.00.0.00.01/2023	LO	BLUD MEI MEKTAN DISTABUN 2023	BLUD MEI	3.291.693	3.291.693
31-05-2023	005/PDPT-LRA/BLUD/3.27.0.00.0.00.01/2023	LRA	BLUD MEI MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD MEI	3.291.693	3.291.693
30-06-2023	006/BELN-LO/BLUD/3.27.0.00.0.00.01/2023	LO	BLUD JUNI MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD JUNI	659.391	659.391

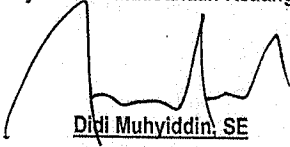
1	2	3	4	5	6	7
30-06-2023	006/BELN-LRA/BLU D/3.27.0.00.0.00.01/ 2023	LRA	BLUD JUNI MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD JUNI	659.391	659.391
30-06-2023	006/PDPT-LO/BLUD /3.27.0.00.0.00.01/2 023	LO	BLUD MEKTAN JUNI DISTANBUN 2023	BLUD JUNI	3.296.954	3.296.954
30-06-2023	006/PDPT-LRA/BLU D/3.27.0.00.0.00.01/ 2023	LRA	BLUD MEKTAN JUNI DISTANBUN 2023	BLUD JUNI	3.296.954	3.296.954
31-07-2023	007/BELN-LO/BLUD /3.27.0.00.0.00.01/2 023	LO	BLUD JULI MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD JULI	663.284	663.284
31-07-2023	007/PDPT-LO/BLUD /3.27.0.00.0.00.01/2 023	LO	BLUD JULI MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD JULI	3.316.420	3.316.420
31-07-2023	007/PDPT-LRA/BLU D/3.27.0.00.0.00.01/ 2023	LRA	BLUD JULI MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD JULI	3.316.420	3.316.420
31-08-2023	008/BELN-LO/BLUD /3.27.0.00.0.00.01/2 023	LO	BLUD AGUSTUS MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD AGUSTUS	694.292	694.292
31-08-2023	008/BELN-LRA/BLU D/3.27.0.00.0.00.01/ 2023	LRA	BLUD AGUSTUS MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD AGUSTUS	694.292	694.292
31-08-2023	008/PDPT-LO/BLUD /3.27.0.00.0.00.01/2 023	LO	BLUD AGUSTUS MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD AGUSTUS	3.471.458	3.471.458
31-08-2023	008/PDPT-LRA/BLU D/3.27.0.00.0.00.01/ 2023	LRA	BLUD AGUSTUS MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD AGUSTUS	3.471.458	3.471.458
30-09-2023	009/BELN-LO/BLUD /3.27.0.00.0.00.01/2 023	LO	BLUD SEPTEMBER MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD SEPTEMBER	670.078	670.078
30-09-2023	009/BELN-LRA/BLU D/3.27.0.00.0.00.01/ 2023	LRA	BLUD SEPTEMBER MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD SEPTEMBER	670.078	670.078
30-09-2023	009/PDPT-LO/BLUD /3.27.0.00.0.00.01/2 023	LO	BLUD SEPTEMBER MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD SEPTEMBER	4.250.392	4.250.392
30-09-2023	009/PDPT-LRA/BLU D/3.27.0.00.0.00.01/ 2023	LRA	BLUD SEPTEMBER MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD SEPTEMBER	4.250.392	4.250.392
06-10-2023	007/BELN-LRA/BLU D/3.27.0.00.0.00.01/ 2023	LRA	BLUD JULI MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD JULI	663.284	663.284
31-10-2023	010/BELN-LO/BLUD /3.27.0.00.0.00.01/2 023	LO	BLUD OKTOBER MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD OKTOBER	639.347	639.347
31-10-2023	010/BELN-LRA/BLU D/3.27.0.00.0.00.01/ 2023	LRA	BLUD OKTOBER MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD OKTOBER	639.347	639.347
31-10-2023	010/PDPT-LO/BLUD /3.27.0.00.0.00.01/2 023	LO	BLUD OKTOBER MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD OKTOBER	7.196.737	7.196.737

1	2	3	4	5	6	7
31-10-2023	010/PDPT-LRA/BLU D/3.27.0.00.0.00.01/ 2023	LRA	BLUD OKTOBER MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD OKTOBER	7.196.737	7.196.737
30-11-2023	011/BELN-LO/BLUD /3.27.0.00.0.00.01/2 023	LO	BLUD NOVEMBER MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD NOVEMBER	589.353	589.353
30-11-2023	011/BELN-LRA/BLU D/3.27.0.00.0.00.01/ 2023	LRA	BLUD NOVEMBER MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD NOVEMBER	589.353	589.353
30-11-2023	011/PDPT-LO/BLUD /3.27.0.00.0.00.01/2 023	LO	BLUD NOVEMBER MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD NOVEMBER	2.946.765	2.946.765
30-11-2023	011/PDPT-LRA/BLU D/3.27.0.00.0.00.01/ 2023	LRA	BLUD NOVEMBER MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD NOVEMBER	2.946.765	2.946.765
31-12-2023	001/JURTUP-LO/3. 27.0.00.0.00.01./20 23	Penutup LO	JURNAL PENUTUP LO TA 2023	JURNAL PENUTUP LO TA 2023	191.644.820.051	191.644.820.051
31-12-2023	001/JURTUP-LRA/3 .27.0.00.0.00.01./20 23	Penutup LRA	JURNAL PENUTUP LRA TA 2023	JURNAL PENUTUP LRA TA 2023	196.014.238.995	196.014.238.995
31-12-2023	001/JURTUP-SURP LUS-DEFISIT/3.27.0 .00.0.00.01./2023	Penutup Surplus/Defisit LRA	JURNAL PENUTUP SURPLUS DEFISIT LRA TA 2023	JURNAL PENUTUP SURPLUS DEFISIT LRA TA 2023	195.613.815.206	195.613.815.206
31-12-2023	012/BELN-LO/BLUD /3.27.0.00.0.00.01/2 023	LO	BLUD DESEMBER MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD DESEMBER	693.729	693.729
31-12-2023	012/BELN-LRA/BLU D/3.27.0.00.0.00.01/ 2023	LRA	BLUD DESEMBER MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD DESEMBER	693.729	693.729
31-12-2023	012/PDPT-LO/BLUD /3.27.0.00.0.00.01/2 023	LO	BLUD DESEMBER MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD DESEMBER	3.468.647	3.468.647
31-12-2023	012/PDPT-LRA/BLU D/3.27.0.00.0.00.01/ 2023	LRA	BLUD DESEMBER MEKTAN DISTANBUN 2023	BLUD DESEMBER	3.468.647	3.468.647
31-12-2023	013/BEBAN-UTANG /3.27.0.00.0.00.01./ 2023	LO	PENGAKUAN UTANG LISTRIK AIR TELEPON TAGIHAN DES 2023	UTANG LISTRIK AIR TELEPON DES 2023	152.425.564	152.425.564
31-12-2023	015/PERSD/3.27.0. 00.0.00.01./2023	LO	STOCK OPNAME PERSEDIAAN TA 2023	STOCK OPNAME PERSEDIAAN TA 2023	343.627.285	343.627.285
31-12-2023	016/CP-GU-LRA/3.2 7.0.00.0.00.01./202 3	LRA	Pengembalian Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas biasa	Kelebihan pembayaran Revisi APBA-P	31.359.680	31.359.680
31-12-2023	017/CP-GU-LO/3.27 .0.00.0.00.01./2023	LO	Pengembalian Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas biasa	Kelebihan pembayaran Revisi APBA-P	31.359.680	31.359.680
31-12-2023	018/HAPUS-PDPT-D IMUKA/3.27.0.00.0. 00.01./2023	LO	PENGHAPUSAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA SEWA KANTIN UNIT DIKLAT TANBUN NOMOR 520/07/II.3 TANGGAL 3 AGUSTUS 2023	PENGHAPUSAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA SEWA KANTIN	11.726.027	11.726.027
31-12-2023	019/REKLAS-AT/3.2 7.0.00.0.00.01./202 3	LO	REKLAS DARI ALAT PERTANIAN KE ALAT BENGKEL	REKLAS DARI ALAT PERTANIAN KE ALAT BENGKEL	162.700.000	162.700.000

1	2	3	4	5	6	7
31-12-2023	020/REKLAS-AT/3.2 7.0.00.0.00.01./202 3	LO	REKLAS DARI ALAT PERTANIAN KE ALAT LABOR	REKLAS DARI ALAT PERTANIAN KE ALAT LABOR	1.765.440.000	1.765.440.000
31-12-2023	021/REKLAS-AT/3.2 7.0.00.0.00.01./202 3	LO	REKLAS DARI ALAT LAB KE BANGUNAN GEDUNG	REKLAS DARI ALAT LAB KE BANGUNAN GEDUNG	147.890.000	147.890.000
31-12-2023	022/REKLAS-AT/3.2 7.0.00.0.00.01./202 3	LO	REKLAS DARI ALAT PERTANIAN KE KOMPUTER	REKLAS DARI ALAT PERTANIAN KE KOMPUTER	110.120.000	110.120.000
31-12-2023	023/REKLAS-AT/3.2 7.0.00.0.00.01./202 3	LO	REKLAS DARI ALAT PERTANIAN KE ALAT KANTOR RT	REKLAS DARI ALAT PERTANIAN KE ALAT KANTOR RT	57.800.000	57.800.000
31-12-2023	024/REKLAS-AT/3.2 7.0.00.0.00.01./202 3	LO	REKLAS DARI ALAT STUDIO KE ALAT KANTOR RT	REKLAS DARI ALAT STUDIO KE ALAT KANTOR RT	119.560.000	119.560.000
31-12-2023	025/REKLAS-AT/3.2 7.0.00.0.00.01./202 3	LO	REKLAS DARI BANGUNAN GEDUNG KE PAGAR	REKLAS DARI BANGUNAN GEDUNG KE PAGAR	210.378.232	210.378.232
31-12-2023	026/REKLAS-AT/3.2 7.0.00.0.00.01./202 3	LO	REKLAS DARI BANGUNAN GEDUNG KE BANGUNAN AIR	REKLAS DARI BANGUNAN GEDUNG KE BANGUNAN AIR	209.369.300	209.369.300
31-12-2023	027/REKLAS-AT/3.2 7.0.00.0.00.01./202 3	LO	REKLAS DARI BANGUNAN AIR KE INSTALASI	REKLAS DARI BANGUNAN AIR KE INSTALASI	10.800.000	10.800.000
31-12-2023	028/REKLAS-AT/3.2 7.0.00.0.00.01./202 3	LO	REKLAS DARI BANGUNAN GEDUNG KE JARINGAN	REKLAS DARI BANGUNAN GEDUNG KE JARINGAN	99.777.900	99.777.900
31-12-2023	029/EXTRACOM/3. 27.0.00.0.00.01./20 23	LO	REKLAS DARI PERALATAN MESIN KE EXTRACOM	REKLAS DARI PERALATAN MESIN KE EXTRACOM	13.584.520	13.584.520
31-12-2023	030/REKLAS-AT/3.2 7.0.00.0.00.01./202 3	LO	REKLAS DARI ALAT LAB KE ALAT KANTOR RT	REKLAS DARI ALAT LAB KE ALAT KANTOR RT	32.185.000	32.185.000
31-12-2023	031/REKLAS-AT/3.2 7.0.00.0.00.01./202 3	LO	REKLAS DARI ALAT LAB KE ALAT BENGKEL	REKLAS DARI ALAT LAB KE ALAT BENGKEL	7.770.000	7.770.000
31-12-2023	032/REKLAS-AT/3.2 7.0.00.0.00.01./202 3	LO	REKLAS DARI ALAT LAB KE INSTALASI	REKLAS DARI ALAT LAB KE INSTALASI	1.665.000	1.665.000
31-12-2023	033/REKLAS-AT/3.2 7.0.00.0.00.01./202 3	LO	REKLAS DARI KDP KE KIB C BANGUNAN GEDUNG	REKLAS DARI KDP KE KIB C BANGUNAN GEDUNG	4.537.558.376	4.537.558.376
31-12-2023	034/BEBAN-PENYU /3.27.0.00.0.00.01./ 2023	LO	BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP DALAM RENOVASI TA 2023	BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP DALAM RENOVASI TA 2023	10.891.587	10.891.587
31-12-2023	035/BEBAN-PENYU -AL/3.27.0.00.0.00.0 1/2023	LO	BEBAN PENYUSUTAN ASET HIBAH DAN ASET LAIN LAINNYA	BEBAN PENYUSUTAN ASET HIBAH DAN ASET LAIN LAINNYA	976.983.061	976.983.061
31-12-2023	036/PDPT-DIMUKA/ 3.27.0.00.0.00.01./2 023	LO	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA Perjanjian Sewa Kantin Atas nama Unit Diklat Pertanian dan Perkebunan Nomor 520/07/VII.3 Tgl 3 Agustus 2023 dengan nilai kontrak Rp 20.000.000	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	11.748.634	11.748.634

1	2	3	4	5	6	7
31-12-2023	037/BEBAN-PENYU/3.27.0.00.0.0 0.01./2023	LO	BEBAN PENYUSUTAN KIB B TA 2023	BEBAN PENYUSUTAN KIB B TA 2023	5.065.804.283	5.065.804.283
31-12-2023	038/PENYESUAIAN-PENYU/3.27.0.00.0.0 0.01./2023	LO	PENYESUAIAN PENYUSUTAN ATR TA 2022	PENYESUAIAN PENYUSUTAN ATR TA 2022	1.316.960	1.316.960
31-12-2023	039/PENYESUAIAN-PENYU/3.27.0.00.0.0 0.01./2023	LO	PENYESUAIAN PENYUSUTAN KIB C AKUMULASI TA 2022	PENYESUAIAN PENYUSUTAN KIB C AKUMULASI TA 2022	87.527.556	87.527.556
31-12-2023	040/BEBAN-PENYU/3.27.0.00.0.0 0.01./2023	LO	BEBAN PENYUSUTAN KIB C TA 2023	BEBAN PENYUSUTAN KIB C TA 2023	3.558.200.386	3.558.200.386
31-12-2023	041/BEBAN-PENYU/3.27.0.00.0.0 0.01./2023	LO	BEBAN PENYUSUTAN KIB D TA 2023	BEBAN PENYUSUTAN KIB D TA 2023	876.950.811	876.950.811

Banda Aceh, 31 Desember 2023
Pejabat Penatausahaan Keuangan



Didi Muhyiddin, SE
NIP. 19720222 200801 1 001